

**EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN (PROGRAM RASKIN) DAN
MANFAATNYA BAGI RUMAH TANGGA SASARAN
PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)
DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

Oleh

**YUMA YUNITA
1010222037**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2014**

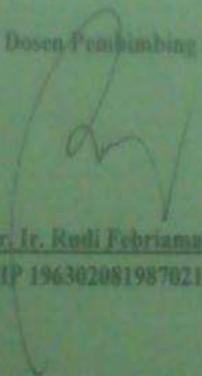
EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN (PROGRAM RASKIN) DAN
MANFAATNYA BAGI RUMAH TANGGA SASARAN
PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)
DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SKRIPSI

OLEH
YUMA YUNITA
1010221037

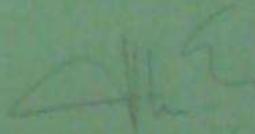
MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc
NIP 196302081987021001

Dosen Pembimbing II



Muhammad Hendri, SP., MM
NIP 197810042006041002

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas



Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc
NIP 195312161980031004

Ketua Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas



Dr. Ir. Osmet, M.Sc
NIP 195510191987021001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Allah menerangkan (kepada sekalian makhluk-Nya dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”

(Q.S. Ali 'Imran ayat 18)

Persembahan kecilku untuk:

Ayahanda Hirman A.R dan Ibunda Yuliza Satifa yang telah memberikan segenap daya upaya serta do'anya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringan salam disampaikan buat Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Skripsi ini disusun dari hasil penelitian dalam bentuk survey di lapangan dengan judul “Evaluasi Keberhasilan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Program Raskin) dan Manfaatnya bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan”. Penulisan skripsi ini sebagai aplikasi ilmiah dari mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc dan Bapak Muhammad Hendri, SP., MM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, nasehat, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan pula kepada Bapak Dr. Ir. Osmet, M.Sc., Bapak Ferdhinal Asful, SP., M.Si, dan Ibuk Dra. Elfi Rahmi, M.Si yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Wali Nagari Limau Gadang Pc. Taba, Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan informasi kepada penulis selama penelitian. Selanjutnya, terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan informasi ilmiah terutama tentang evaluasi program. Amin.

Padang, Desember 2014

Y.Y

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Kebutuhan Dasar	9
B. Konsep Kemiskinan dan Kesejahteraan	12
1. Konsep Kemiskinan	12
2. Konsep Kesejahteraan	15
C. Evaluasi Kebijakan Publik	17
D. Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin)	22
E. Program Raskin	24
F. Penelitian Terdahulu	30
G. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Waktu dan Tempat Penelitian	33
B. Metode Penelitian	33
C. Teknik Pengambilan Sampel	34
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Variabel Penelitian	37
F. Analisis Data	38
G. Definisi Operasional	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	45
1. Keadaan Fisik dan Geografi	45
2. Keadaan Penduduk	46
3. Sarana dan Prasarana	48
B. Karakteristik Sampel	49
C. Analisa Tingkat Keberhasilan Program Raskin di Kecamatan IV ... Nagari Bayang Utara	51
1. Ketepatan Sasaran	51
2. Ketepatan Jumlah	53
3. Ketepatan Harga	55
4. Ketepatan Waktu	57
5. Ketepatan Kualitas	58
6. Ketepatan Administrasi	59
7. Analisa Tingkat Keberhasilan Program Raskin bagi RTS	61
D. Analisa Tingkat Manfaat Program yang Diperoleh oleh Rumah	62
Tangga Sasaran di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	
1. Jumlah Konsumsi Beras dan Besar Pengeluaran Per-kapita	62
Per-bulan di Tingkat Rumah Tangga Sebelum Menerima Raskin	
2. Pengurangan Beban Pengeluaran Per-kapita di Tingkat	65
Rumah Tangga Setelah Menerima Raskin	
3. Analisa Tingkat Manfaat Program Raskin bagi RTS-PM	66
E. Analisa Hubungan Antara Tingkat Keberhasilan Program dengan ...	67
Tingkat Manfaat yang Diperoleh oleh Rumah Tangga Sasaran	
di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	
1. Analisis Chi-square (Kai-kwadrat)	68
2. Analisis Koefisien Kontingensi	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Daerah Pada bulan Maret 2013 – September 2013	1
2. Perbandingan Konsumsi Beras Masyarakat Pedesaan dengan Perkotaan	14
3. Indikator Evaluasi dalam Menilai Keberhasilan Kebijakan	20
4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan Program Raskin, 2013	25
5. Tingkatan Keberhasilan Program oleh Litbang Depdagri	29
6. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin pada Setiap Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2013	34
7. Tabulasi Silang antara Keberhasilan dan Manfaat Program Raskin	41
8. Interval Koefisien Korelasi dan Kekuatan Hubungan Antar Variabel	42
9. Matriks Data Set Penelitian	44
10. Luas Daerah menurut Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	45
11. Luas Lahan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013 menurut Jenis dan Penggunaannya	46
12. Jumlah Penduduk di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2013	46
13. Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Per-nagari tahun 2013	47
14. Sarana dan Prasarana di Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	48
15. Karakteristik Rumah Tangga Sampel Penerima Raskin tahun 2013	49
16. Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga Sampel	52
17. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Raskin tahun 2013	52
18. Ketepatan Jumlah Raskin yang Diterima Rumah Tangga tahun 2013	54
19. Ketepatan Harga Raskin yang Diterima Rumah Tangga tahun 2013	56
20. Ketepatan Waktu Penyaluran Raskin tahun 2013	57
21. Ketepatan Kualitas Raskin bagi Rumah Tangga tahun 2013	58
22. Ketepatan Administrasi dalam Pembayaran Raskin oleh Rumah Tangga tahun 2013	60
23. Tingkat Keberhasilan Program Raskin bagi Rumah Tangga Sampel tahun 2013	61
24. Jumlah Konsumsi Beras Per-kapita/bulan	63

25. Jumlah Pengeluaran Per-kapita/bulan untuk Konsumsi Beras Sebelum Menerima Raskin	64
26. Jumlah Pengurangan Beban Pengeluaran Per-kapita/bulan Setelah Menerima Raskin	65
27. Tingkat Manfaat Program Raskin Per-kapita/bulan di Tingkat Rumah Tangga pada tahun 2013	66
28. Perhitungan nilai e_{ij} dan χ^2	68
29. Hubungan Keberhasilan Program Raskin dengan Manfaat yang Diperoleh RTS	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kebijakan Sebagai Suatu Proses oleh Subarsono	19
2. Alur Distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin	27
3. Kerangka Pemikiran Evaluasi Keberhasilan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin	32

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Penetapan Pagu Beras bagi Keluarga Miskin (Raskin) Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013	77
2. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota tahun 2013	78
3. Penetapan Pagu Beras untuk Keluarga Miskin Per-Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013	79
4. Daerah/Kabupaten yang Menunggak Pembayaran Hasil Penjualan Raskin pada tahun 2013 di Sumatera barat	80
5. Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013	81
6. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Program Raskin di Kabupaten Pesisir Selatan	82
7. Penetapan Pagu Beras bagi Keluarga Miskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2013	83
8. Daftar Populasi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin di Nagari Ngalau Gadang tahun 2013	84
9. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang Menjadi Responden Penelitian di Nagari Limau Gadang	86
10. Data Tingkat Keberhasilan Program Raskin Bagi Setiap Rumah Tangga Responden di Nagari Limau Gadang Pc. Taba tahun 2013	87
11. Data Tingkat Manfaat Program Raskin Bagi Rumah Tangga Responden di Nagari Limau Gadang Pc. Taba tahun 2013	91
12. Dokumentasi Penelitian	95
13. Surat Penelitian Mahasiswa Fakultas Pertanian	103
14. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	104
15. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian dari Wali Nagari Limau Gadang Pc. Taba	105
16. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian dari Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	106

**EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN (PROGRAM RASKIN) DAN
MANFAATNYA BAGI RUMAH TANGGA SASARAN
PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)
DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan manfaat program Raskin, serta menganalisis hubungan antara keberhasilan dan manfaat program Raskin tersebut di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, dengan menggunakan metode survey pada 69 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program Raskin di daerah penelitian berada pada persentase 42,51% dengan kategori “cukup berhasil”, karena masih adanya ketidaktepatan pelaksanaan pada beberapa indikator keberhasilan. Sedangkan, untuk tingkat manfaat program Raskin berada pada persentase 21,39% dengan kategori “kurang bermanfaat”, karena tingginya rata-rata pengeluaran/kapita/bulan sebelum menerima Raskin yaitu Rp. 65.425/bulan dibandingkan dengan rata-rata pengurangan beban pengeluaran/kapita/bulan setelah menerima Raskin yaitu Rp. 13.933/bulan. Hal lain yang mempengaruhi tingkat manfaat program Raskin adalah tingginya jumlah konsumsi beras rumah tangga yaitu 42 kg/bulan dibandingkan dengan jumlah bantuan Raskin yang diperoleh yaitu 11,56 kg/RTS/bulan. Selanjutnya, hasil analisis *chi-square* menunjukkan bahwa $\chi^2= 2,931$ (terima H_0), artinya tidak terdapat hubungan antara variabel keberhasilan dengan variabel manfaat program Raskin dan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,0238, artinya kekuatan hubungan antara kedua variabel sangat rendah. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diberikan beberapa saran agar keberhasilan dan manfaat program Raskin menjadi optimal yaitu melakukan kembali pemutakhiran data RTS-PM, menambah jumlah beras yang diberikan, dan menambah anggaran untuk biaya operasional penyaluran Raskin sampai Titik Bagi (TB) dengan mempertimbangkan keadaan geografis suatu daerah.

Kata kunci: evaluasi, keberhasilan, manfaat, program raskin

**SUCCESS PROGRAM EVALUATION OF RICE HOUSEHOLD
FOR POOR (RASKIN) AND BENEFITS TARGETS FOR
HOUSEHOLD BENEFICIARIES (RTS-PM) IN IV NAGARI
BAYANG UTARA SUB DISTRICT PESISIR SELATAN
DISTRICT**

Abstract

This research aim to assess the success and benefits of Raskin program, as well as to analyze the relationship between the success and benefits of the Raskin program in IV Nagari Bayang Utara Sub District, using survey methods at 69 Target Households (RTS). The results showed that the success rate Raskin program in the area of research is the percentage of 42,51% with the category "quite successful", because there is still the implementation of the inappropriateness of some indicators of success. Whereas, to the level of program benefits Raskin is the percentage of 21,39% with the category "less useful", because of the high average expenditure/capita/month before receiving Raskin is Rp. 65.425/month compared with an average reduction of expenditure/capita/month after receiving Raskin is Rp. 13.933/month. Another thing that affects the level of benefits Raskin is the high amount of domestic rice consumption is 42 kg/month compared to the amount obtained by the help of Raskin 11,56 kg/RTS/month. Furthermore, the results of chi-square analysis showed that $\chi^2 = 2,931$ (received H_0), meaning that there is no relationship between variables the success with variable benefits of Raskin program and contingency coefficient of 0,0238, meaning that the strength of the relationship between the two variables is very low. From these results, it can be given some advice to the success and benefits of the program to be optimal Raskin is doing re-PM RTS data updating, adding a given amount of rice, and increase the budget for operational costs Raskin distribution to point Share (TB) taking into account the geographical situation an area.

Keywords: evaluation, successful, benefits, raskin program

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya manusia dan sumber daya alam, namun ternyata semua itu tidak dapat menjamin tercapainya tingkat kesejahteraan rakyat dan mengangkat martabat bangsa Indonesia (Munandar, 2008:151). Krisis ekonomi pada tahun 1998 yang diawali dari gejolak krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional. Berbagai upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan pemerintah hingga saat ini. Pemulihan dilakukan pada semua sektor melalui masing-masing kebijakan untuk tiap-tiap sektor dengan melihat masalah-masalah yang sedang menjadi isu penting saat ini. Salah satu isu penting permasalahan di Indonesia hingga saat ini adalah masalah kemiskinan (Suharto dalam Panjaya, 2011:1).

Berdasarkan data Statistik Indonesia (BPS, 2014:106), jumlah penduduk miskin pada bulan September 2013 mencapai 11,47 persen atau sebanyak 28,55 juta orang. Jumlah ini bertambah sebesar 0,1 persen atau sebanyak 0,48 juta orang dari jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang berjumlah sebanyak 28,07 juta orang atau 11,37 persen. Pada bulan Maret – September 2013 tersebut, jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan (Tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Daerah Pada bulan Maret 2013 – September 2013.

No	Daerah	Maret 2013		September 2013	
		Jumlah (Juta Orang)	%	Jumlah (Juta Orang)	%
1.	Perkotaan	10,33	8,39	10,63	8,52
2.	Perdesaan	17,74	14,32	17,92	14,42
3.	Perkotaan + Perdesaan	28,07	11,37	28,55	11,47

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Bukan hanya karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama,

melainkan juga karena masalah kemiskinan masih menjadi persoalan utama dan bahkan saat ini gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Badan Pusat Statistik dalam Cahyat (2004:2) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Standard minimal kebutuhan hidup setiap daerah berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Septian, *dkk.*, (2013:1), mengatakan bahwa kebutuhan minimal tersebut paling tinggi adalah kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga seseorang dapat bekerja untuk memperoleh pendapatan.

Permasalahan kemiskinan juga berkaitan dan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan naiknya harga barang-barang konsumsi (*inflasi*). Berdasarkan data BPS (2014:107), tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan dari 5,92 persen pada bulan Februari 2013 menjadi 6,25 persen pada bulan Agustus 2013. Kemudian pada periode bulan Maret – September 2013, juga terjadi inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,02 persen. Peningkatan jumlah pengangguran dan terjadinya inflasi pada beberapa barang konsumsi di Indonesia mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi sulit untuk dicapai, baik pada masyarakat desa maupun masyarakat kota.

Untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, Pemerintah menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas Pemerintah Indonesia. Saat ini, Pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang terbagi dalam 3 (tiga) klaster: 1) klaster I adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial dan perlindungan sosial, seperti: Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), 2) klaster II adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti: Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM), dan 3) klaster III adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) (TNP2K, 2009).

Program Raskin termasuk dalam kelompok program klaster I yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin yang bersifat langsung dan dapat dirasakan langsung manfaatnya. Program Raskin merupakan program perlindungan sosial yang mendukung program lainnya, seperti: perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan produktivitas rumah tangga miskin (Bungkaes., *dkk*, 2013:2). Program ini juga merupakan salah satu bentuk upaya perwujudan agenda pembangunan dunia yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Millenium Development Goals (MDG's)* 1990-2015 yaitu “*Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim*” (OECD dalam Mardikanto, 2010:1).

Sejak krisis pangan pada tahun 1998, pemerintah telah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Namun, pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih memfokuskan pada sasaran penerima manfaat (Menko Kesra, 2013:4). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2003 Pasal 6 dan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2012, secara khusus kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan rawan pangan dengan penyediaan utama berasal dari beras/gabah dari petani dalam negeri.

Tabor dan Husein (2005:9), mengatakan bahwa dalam pengeluaran pembangunan pemerintah, program Raskin mengambil porsi yang cukup besar. Pada tahun 2013, jumlah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk program Raskin mencapai Rp. 17,2 triliun, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang berjumlah Rp. 11,4 triliun (Menteri Keuangan RI, 2012:2). Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun, dilihat dari pelaksanaannya selama ini, program Raskin masih memiliki banyak hambatan baik secara teknis pembagian maupun kebocoran-kebocoran aliran bantuan beras Raskin lainnya. Suntoro (2003:1-2) dalam artikelnya mengemukakan tentang penyaluran Raskin di lapangan, menurutnya terdapat

delapan kesalahan yang terjadi dalam penyaluran Raskin yaitu: 1) salah sasaran, 2) mutu beras jelek, 3) Raskin dijual lagi ke pasar, 4) jumlah Raskin yang dibagikan berkurang, 5) harga yang tidak sesuai, 6) adanya biaya tambahan, 7) terdapatnya kesalahan data, dan 8) terjadinya tunggakan setoran pembayaran.

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Raskin dalam mencapai tujuannya, diperlukan adanya koordinasi antar seluruh instansi terkait, dimulai dari pusat sampai ke tingkat daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, mulai dari perencanaan sampai implementasinya dengan mengikutsertakan berbagai unsur masyarakat dan pihak terkait lainnya. Selain perlunya koordinasi antar instansi terkait, aktivitas pelaksanaan program Raskin juga perlu dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, menentukan relevansi, efisiensi, efektifitas, manfaat dan dampak dari kegiatan dengan pandangan untuk penyempurnaan kegiatan yang sedang berjalan, membantu perencanaan, menyusun program dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Wirawan (2011:7) dalam bukunya yang berjudul "*Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*", menyampaikan bahwa:

Evaluasi merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat terkait objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2011:7).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2013, tujuan program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-25-2013, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 adalah 275.431 dengan jumlah alokasi pagu Raskin sebanyak 61.971.975 kg yang disalurkan selama 15 kali untuk 19 kabupaten/kota (Lampiran 1). Penyaluran yang ke-13, 14, dan 15 masing-masing disalurkan pada bulan Juni, Juli, dan September atau selambat-lambatnya disalurkan sampai bulan Desember tahun 2013.

Hasil Sensus Pertanian pada bulan Mei tahun 2013 (BPS Sumatera Barat, 2013:6) menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah yang memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Sumatera Barat pada tahun 2013, yaitu sebanyak 71.563 rumah tangga (Lampiran 2). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang hidup dengan bergantung pada pola-pola pertanian (agraris), meskipun ada juga kelompok masyarakat yang bekerja sebagai pedagang dan pada sektor non-pertanian. Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan salah satu daerah penyaluran Raskin di Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 15 kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan Nomor 500/149/Kpts/BPT-PS/2013, jumlah pagu Raskin yang disalurkan adalah sebanyak 5.467.050 Kg untuk 24.298 RTS (Lampiran 3).

Dalam pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2013 masih terdapat beberapa kendala dan masalah, sebagaimana diberitakan pada beberapa media massa pada tahun tersebut diantaranya: 1) ketidaktepatan kuota, judul berita "*Warga Keluhkan Distribusi Raskin*" (Padeks, 06/06/2013), 2) ketidaktepatan administrasi, judul berita "*Distribusi Raskin Tersendat*" (Padeks, 15/05/2013), 3) keterlambatan penyaluran oleh Bulog, judul berita "*Keluarga Miskin Pessel Belum Terima Raskin*" (Antara Sumbar, 05/03/2013), dan 4) Pesisir Selatan merupakan daerah yang menunggak pembayaran hasil penjualan Raskin terbesar pada tahun 2013 (Lampiran 4), dengan judul berita "*Tiga Daerah di Sumbar Menunggak Hasil Penjualan Raskin*" (Ranah Berita, 10/01/2014). Permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya mencapai keberhasilan, sehingga tujuan dari program belum dapat dicapai dengan optimal seperti yang diharapkan.

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan termasuk daerah penyaluran Raskin pada tahun 2013. Berdasarkan data BPS Pesisir Selatan (2014:34), Kecamatan IV Nagari Bayang Utara merupakan daerah yang memiliki rumah tangga dengan jumlah paling sedikit dibandingkan daerah lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebanyak 1.525 rumah tangga (Lampiran 5). Pada umumnya, mata pencaharian rumah tangga masyarakat di daerah ini adalah pada bidang pertanian.

Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian bulan Mei 2013 (BPS Pesisir Selatan, 2013:10), sekitar 1.419 rumah tangga atau 93 persen dari rumah tangga yang ada adalah rumah tangga yang mengusahakan pertanian. Kemudian, sesuai data jumlah rumah tangga yang ada pada daerah penelitian diperoleh bahwa 51 persen diantaranya termasuk ke dalam kategori miskin dan penerima Raskin yaitu sebanyak 778 RTS (Lampiran 6). Pada daerah ini, Raskin disalurkan ke 6 (enam) nagari yang ada dengan jumlah pagu yang disalurkan yaitu sebanyak 175.050 kg selama tahun 2013 (Lampiran 7).

Program Raskin seharusnya mampu memberikan manfaat terhadap rumah tangga miskin yang menjadi sasaran program, sebagaimana tujuan dari program tersebut yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras (Menko Kesra, 2013:11). Untuk mencapai tujuan tersebut harusnya pelaksanaan program Raskin dilaksanakan sesuai dengan indikator keberhasilan kinerja program Raskin yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Umum Raskin tahun 2013, yaitu tercapainya target 6T yang terdiri atas: 1) tepat sasaran penerima Raskin yaitu Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, 2) tepat jumlah yaitu jumlah beras Raskin yang merupakan hak atas RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan, 3) tepat harga yaitu harga tebus Raskin sebesar Rp. 1.600/kg di Titik Distribusi (TD), 4) tepat kualitas yaitu beras yang dibagikan berkualitas medium dengan aturan kadar air tidak lebih 14 persen dan tidak boleh lebih dari 20 persen yang patah serta derajat kebersihan harus 90 persen, tidak apek, tidak berbau dan tidak berkutu, 5) tepat waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran, dan 6) tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang peneliti lakukan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, diperoleh informasi bahwa jumlah dan harga yang diterima oleh RTS tidak sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan dalam Pedum Raskin 2013 yaitu 15 kg/bulan/RTS dan Rp. 1.600/kg.

Kenyataannya di lapangan adalah jumlah Raskin yang diterima RTS menjadi lebih sedikit dan harga menjadi lebih mahal, bahkan juga diberlakukan “*sistem bagi rata*” karena alasan-alasan tertentu. Dari hasil temuan lapangan tersebut menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian sehingga keberhasilan dan manfaat program Raskin belum bisa dicapai secara optimal oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Oleh karena itu, temuan awal ini perlu diuji kebenarannya secara ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka sebagai pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ?
2. Bagaimana tingkat manfaat program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ?
3. Apakah ada hubungan antara tingkat keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh oleh RTS di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ?

Melihat latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “**Evaluasi Keberhasilan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Program Raskin) dan Manfaatnya Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan**”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat keberhasilan program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
2. Mengetahui tingkat manfaat program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
3. Menganalisis hubungan antara keberhasilan program dengan manfaat program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya bidang kajian evaluasi program.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak terkait dalam melakukan penataan kembali terhadap manajemen distribusi agar keberhasilan dan manfaat dari program dapat dicapai sebagaimana tujuan dari program tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebutuhan Dasar

Masalah kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan nasional, tetapi juga merupakan permasalahan dunia. Saat sekarang ini, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mengalami permasalahan kemiskinan yang cukup besar. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk pemerataan pendapatan masyarakat perlu terus dilakukan melalui berbagai bidang kehidupan, agar masyarakat yang tergolong 'miskin' setidaknya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Kebutuhan pokok yang dimaksud sebagai kebutuhan dasar (*basic needs*) menurut Bungkaes, *dkk.*, (2013:4), merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, baik yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi individu (makan, perumahan, pakaian), maupun kebutuhan akan pelayanan sosial (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan). Berhubungan dengan hal ini, Green (dalam Badan Pusat Statistik, 2011:11) mengemukakan bahwa komponen kebutuhan dasar meliputi: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public service* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.

Menurut United Nations dalam BPS (2011:10), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia. Dalam kaitan ini, UNSRID (*United Nations Research Institute for Social Development*) dalam BPS (2011:10), membagi komponen kebutuhan dasar menjadi tiga yaitu: (i) kebutuhan fisik primer yang meliputi kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang meliputi pendidikan, rekreasi, dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan. Sedangkan, Ganguli dan Gupta dalam BPS (2011:10) mengemukakan komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.

Lain halnya dengan Badan Pusat Statistik (2011:11-12) yang membagi komponen kebutuhan dasar atas dua kategori yaitu: (i) pangan (padi-padian dan hasil-hasilnya, umbi-umbian dan hasil-hasilnya, ikan dan hasil-hasil ikan lainnya, daging, telur, susu, dan hasil-hasil dari susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang mengandung alkohol, tembakau dan sirih), dan (ii) bukan pangan (perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air, barang-barang dan jasa-jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, barang-barang yang tahan lama, keperluan pesta dan upacara).

Berdasarkan komposisi pengeluaran konsumsi masyarakat tersebut, maka dapat dihitung besarnya kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen (pangan dan bukan pangan). Badan Pusat Statistik (2011:12-13) menjelaskan indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut sebagai berikut:

1. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.
2. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
3. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air.
4. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).
5. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, biaya dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

Munculnya kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*) karena pendekatan berorientasi pertumbuhan (*growth oriented approach*) yang selama ini dianggap telah memberi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, ternyata belum mampu memberikan dampak pada pemerataan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penurunan jumlah pengangguran. Sejalan dengan pandangan tersebut, UI Haq dalam Kasim (2006:16-17) merekomendasikan dan menyampaikan pandangan baru mengenai pembangunan

dengan menyatakan bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi secara tidak langsung melalui laju pertumbuhan ekonomi, tapi harus dilakukan tindakan langsung terhadap kemiskinan dengan desain kebijakan sebagai berikut:

1. Desain kebijakan pembangunan harus bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara langsung, dengan mengukur besar kontribusi pembangunan dalam memberantas penduduk yang kurang gizi, penyakit buta huruf, hidup melarat, pengangguran dan ketimpangan.
2. Perencanaan pembangunan harus berorientasi pada pertumbuhan sekaligus pemerataan.
3. Perencanaan pembangunan berorientasi pada upaya penciptaan lapangan kerja.

Keseluruhan perubahan inilah yang akhirnya akan bermuara pada tiga nilai pembangunan yang dikemukakan oleh Goulet dalam Kasim (2006:17) yaitu: kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Lebih lanjut, Bank Dunia sebagai institusi keuangan yang sangat berpengaruh dalam menggerakkan perekonomian negara berkembang juga ikut mengadopsi perspektif pembangunan tersebut. Pada tahun 1991 dengan tegas Bank Dunia menyatakan bahwa:

Tantangan utama pembangunan yang dihadapi seluruh negara di dunia adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia, terutama negara-negara yang masih dibelenggu oleh kemiskinan. Kualitas kehidupan yang lebih baik memang hanya bisa dicapai dengan pendapatan yang lebih tinggi, namun hal itu bukan merupakan satu-satunya tujuan pembangunan. Aspek lain yang harus diperhatikan adalah pendidikan yang lebih baik, standar kesehatan dan gizi, serta nutrisi yang lebih baik, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individu dan pelestarian ragam kehidupan budaya (Bank Dunia dalam Kasim, 2006:18).

Upaya pendekatan kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*) dari ILO (*International Labour Organization*) pada dasarnya mengacu pada perubahan arah pembangunan ini. Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, namun masih banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Agar hak dan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat miskin terpenuhi, maka pemerintah melaksanakan program Raskin yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan pokok terutama pangan, khususnya beras bagi rumah tangga miskin (Setiadi dan Kolip, 2011:829-830).

B. Konsep Kemiskinan dan Kesejahteraan

1. Konsep kemiskinan

Kemiskinan bukanlah suatu fenomena yang baru dalam kehidupan sosial, karena kemiskinan merupakan fenomena sosial yang selalu menjadi atribut negara-negara dunia ketiga. Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang berarti bahwa tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan. Definisi tentang kemiskinan sudah mengalami perubahan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator serta permasalahan lain yang melingkupinya. Dewasa ini, kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi, melainkan sudah meluas sampai dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam Cahyat (2004:7), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Sedangkan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dalam Cahyat (2004:7), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis. BPS dalam Cahyat (2004:2) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan, dengan membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan dalam memenuhi kebutuhan minimum makanan dengan acuan yang digunakan yaitu 2.100 kalori per hari.

Menurut Brendley, Salim, dan Lavitan dalam Setiadi dan Kolip (2011:795), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Kemiskinan juga ditunjukkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok. Dengan demikian, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Menurut Baswir dan Sumodiningrat dalam Setiadi dan Kolip (2011:795-796), secara sosioekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut adalah orang-orang miskin karena memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, kalori, *Gross National Product* (GNP) per kapita, dan pengeluaran konsumsi. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1 per hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2 per hari.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.

Kemiskinan menurut asal penyebabnya dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu: (i) kemiskinan natural; (ii) kemiskinan kultural; dan (iii) kemiskinan struktural (Setiadi dan Kolip, 2011:796-797). Berikut akan dijelaskan masing-masing bentuk kemiskinan menurut faktor penyebabnya, yaitu:

- a. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir dalam Setiadi dan Kolip (2011:796), kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasmita dalam Setiadi dan Kolip (2011:797) disebut sebagai "*Persisten Poverty*" yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.

- b. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya.
- c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya Sumodiningrat dalam Setiadi dan Kolip (2011:797), mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Pada awal tahun 1970-an, Sayogyo dalam Cahyat (2004:1) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Tingkat ekuivalen konsumsi beras ini dibedakan menjadi 2 kategori yaitu daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun (Tabel 2).

Tabel 2. Perbandingan Konsumsi Beras Masyarakat Pedesaan dengan Perkotaan

No	Kriteria	Pedesaan (kg/orang/tahun)	Perkotaan (kg/org/tahun)
1.	Melarat	180	270
2.	Sangat Miskin	240	360
3.	Miskin	320	480

Sumber: Sayogyo dalam Cahyat (2004:1).

Sejalan dengan itu, BPS dalam Cahyat (2004:2) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori/orang/hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2000, BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan dasar/garis kemiskinan). Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan. Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 7 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin, yaitu (Badan Pusat Statistik, 2011:17-18):

- a. Luas lantai perkapita
- b. Jenis lantai
- c. Air minum/ketersediaan air bersih
- d. Kepemilikan asset
- e. Pendapatan (total pendapatan/bulan)
- f. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan)
- g. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam)

2. Konsep kesejahteraan

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dalam Bungkaes., *dkk*, (2013:6) dirumuskan sebagai makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (i) rasa aman (*security*); (ii) kesejahteraan (*welfare*); (iii) kebebasan (*freedom*); dan (iv) jati diri (*identity*). Sedangkan Biro Pusat Statistik dalam Bungkaes., *dkk*, (2013:6), menerangkan bahwa untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan ukuran, yaitu: (i) tingkat pendapatan keluarga; (ii) komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; (iii) tingkat pendidikan keluarga; (iv) tingkat kesehatan

keluarga; dan (v) kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Selanjutnya, konsep pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan akhir-akhir ini ialah konsep Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index* atau HDI). Konsep HDI diperkenalkan dan dikembangkan sejak tahun 1985. Meskipun dari tahun ke tahun HDI mendapat penekanan yang berbeda, tetapi intinya HDI mengidentifikasi kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu dalam masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Kemampuan dasar tersebut antara lain: (i) menyangkut kemampuan untuk dapat mencapai umur yang panjang dan hidup sehat; (ii) kemampuan untuk mencapai ilmu pengetahuan; dan (iii) kemampuan untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka hidup yang layak (Cahyat, 2004:6).

Human Development Index (HDI) ini mempunyai tiga komponen yang menunjukkan tingkat kesejahteraan (kemakmuran), yaitu: (i) angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*), jadi menyangkut kesehatan; (ii) tingkat pendidikan (*educational attainment*); dan (iii) tingkat pendapatan (*income*) atau kemampuan daya beli masyarakat (Moeljarto dan Prabowo dalam Bungkaes., *dkk*, 2013:8). Sedangkan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Cahyat (2004:4-5) mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat yang terdiri dari 5 (lima) tingkat kesejahteraan, yaitu:

a. Keluarga prasejahtera (sangat miskin)

Yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: (i) indikator ekonomi (makan dua kali atau lebih sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk setiap aktivitas, bagian terluas lantai bukan dari tanah; dan (ii) indikator non-ekonomi (melaksanakan ibadah, bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan).

b. Keluarga sejahtera I (miskin)

Yaitu keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: (i) indikator ekonomi (paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur, setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling

kurang satu stel pakaian baru, luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni; (ii) indikator non-ekonomi (ibadah teratur, sehat tiga bulan terakhir, punya penghasilan tetap, usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin, usia 6-15 tahun bersekolah, anak lebih dari 2 orang/ber-kb).

c. Keluarga sejahtera II

Yaitu keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: (i) memiliki tabungan keluarga; (ii) makan bersama sambil berkomunikasi; (iii) mengikuti kegiatan masyarakat; (iv) rekreasi bersama (6 bulan sekali); (v) meningkatkan pengetahuan agama; (vi) memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah; dan (vii) menggunakan sarana transportasi.

d. Keluarga sejahtera III

Yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi: (i) memiliki tabungan keluarga; (ii) makan bersama sambil berkomunikasi; (iii) mengikuti kegiatan masyarakat; (iv) rekreasi bersama (6 bulan sekali); (v) meningkatkan pengetahuan agama; (vi) memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah; dan (vii) menggunakan sarana transportasi.

Dan belum dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi: (i) aktif memberikan sumbangan material secara teratur; (ii) aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

e. Keluarga sejahtera III plus

Yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi: (i) aktif memberikan sumbangan material secara teratur; (ii) aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

C. Evaluasi Kebijakan Publik

Kata “evaluasi” sering diartikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai “penilaian”, artinya suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati (Hornby

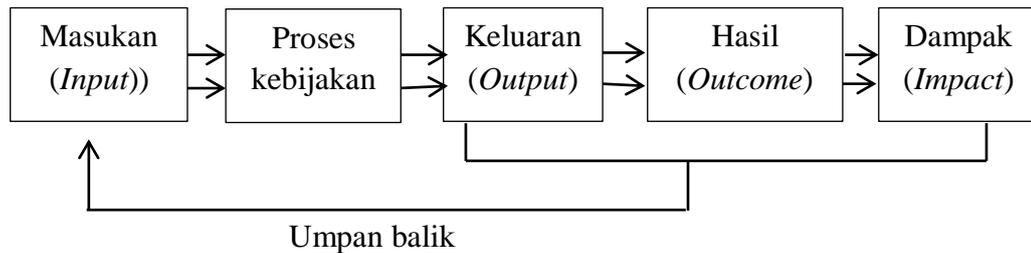
dan Parnwell dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:264). Sedangkan Wirawan (2011:7), mengartikan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Sehubungan dengan itu, Frutchey dalam Mardikanto dan Soebiato (2012:265) mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan:

- 1) Observasi (pengamatan)
- 2) Membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu
- 3) Pengambilan keputusan atau penilaian atas objek yang diamati.

Subarsono (2006:119-122) dalam bukunya yang berjudul “*Analisis Kebijakan Publik*”, mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Untuk mengetahui *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan diperlukan waktu minimal 5 tahun sejak diimplementasikannya kebijakan tersebut. Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut, terdapat beberapa tujuan dari evaluasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan untuk mengetahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan untuk mengetahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan untuk mengetahui berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak (*impact*) suatu kebijakan.
- e. Mengetahui apabila ada penyimpangan yang terjadi dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk proses kebijakan yang akan datang agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (Gambar 1).



Gambar 1. Kebijakan Sebagai Suatu Proses oleh Subarsono (2006:121).

Untuk memahami kebijakan sebagai suatu proses, ada beberapa penggunaan istilah sebagai berikut:

- a. *Input* adalah bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, tuntutan-tuntutan, dan dukungan masyarakat.
- b. *Output* adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program.
- c. *Outcome* adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan.
- d. *Impact* (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Para ahli evaluasi mengemukakan beberapa model atau jenis evaluasi. Michael Scriven dalam Tayibnapis (2008:36-37) dan Taylor dalam Mardikanto dan Soebiato (2012:266) mengemukakan adanya dua macam evaluasi, yaitu evaluasi *formatif* dan evaluasi *sumatif*. Evaluasi *formatif* adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan, sebelum atau selama program atau kegiatan tersebut dijalankan guna memberikan informasi kepada pemimpin program untuk perbaikan program. Sedangkan evaluasi *sumatif* adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada konsumen yang potensial tentang manfaat dan kegunaan program.

Selanjutnya mengenai jenis evaluasi juga dikemukakan oleh Cernea dan Tepping dalam Mardikanto dan Soebiato (2012:266), yang membedakan evaluasi menjadi *on-going evaluation* dan *ex-post evaluation*. Rossi, dkk dalam Mardikanto dan Soebiato (2012:269) mengenalkan tiga tipe evaluasi yaitu

evaluasi terhadap program, pemantauan atau monitoring program, dan evaluasi terhadap dampak program.

Dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Mengenai hal ini, Dunn dalam Subarsono (2006:126) mengemukakan indikator atau kriteria evaluasi yang terbagi atas lima indikator yaitu: 1) efektivitas; 2) kecukupan; 3) pemerataan; 4) responsivitas; dan 5) ketepatan (Tabel 3). Sedangkan Langbein dalam Subarsono (2006:126) membagi kriteria atau indikator program-program publik atas tiga, yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi; 2) distribusi keadilan; dan 3) preferensi warga negara.

Tabel 3. Indikator Evaluasi dalam Menilai Keberhasilan Kebijakan.

No	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2.	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
3.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
4.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
5.	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat

Sumber: Dunn dalam Subarsono (2006:126)

Dalam perkembangan teori implementasi kebijakan dijelaskan bahwa terdapat dua pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (Agustino, 2006:140). Beberapa *scholar* yang menganut aliran *top-down* diantaranya adalah:

1. Donald Van Metter dan Carl Van Horn (*A Model of The Policy Implementation*)

Model ini mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2006:141-144), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu: a) ukuran dan tujuan kebijakan; b) sumberdaya; c) karakteristik agen pelaksana; d) sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (*A Framework for Policy Implementation*)

Model ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Adapun variabel-variabel tersebut dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu: a) mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap (meliputi: kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki; b) kemampuan kebijakan menstruktur proses implemenatsi secara tepat (meliputi: kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam undang-undang, dan akses formal pihak-pihak luar; c) variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi (meliputi: kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, serta kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana (Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino, 2006:144-148).

3. George Edward III (*Direct and Indirect Impact on Implementation*)

Model ini mengemukakan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Edward dalam Agustino, 2006:149-153), yaitu:

- a) Komunikasi, terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: *transmisi, kejelasan, dan konsistensi*.
- b) Sumberdaya, terdapat empat indikator sumberdaya yaitu: *staff, informasi, wewenang, dan fasilitas*.

- c) Disposisi, terdapat dua hal penting yang harus dicermati yaitu: *pengangkatan birokrasi dan insentif*.
 - d) Struktur birokrasi, terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik yaitu: *Standar Operating Procedures (SOPs) dan fragmentasi*.
4. Merilee S. Grindle (*Implementation as A Political and Administrative Process*)
- Menurut Grindle dalam Agustino (2006:154-156), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu, yang terdiri atas:
- a) *Content of Policy*, meliputi: kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*), tipe manfaat (*type of benefits*), derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envision*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementer*), sumber-sumber daya yang digunakan (*resources committed*).
 - b) *Context of Policy*, meliputi: kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, dan strategy of actor involved*), karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristic*), dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*).

D. Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin)

Untuk mengatasi masalah dampak krisis ekonomi, pemerintah Indonesia merencanakan berbagai program, yang dikenal dengan istilah “*social safety net*” atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan program-program kompensasi, yang sekaligus dipadukan dengan program pengentasan kemiskinan (*poverty allevation*). Program JPS merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi keadaan sosial ekonomi masyarakat agar tidak semakin terpuruk akibat ketidakpastian ekonomi (Setiadi dan Kolip, 2011:813).

Pada dasarnya, program JPS bertujuan untuk membantu penduduk miskin supaya tidak menjadi lebih terpuruk dan hidup lebih layak. Sementara itu,

program kompensasi lebih bersifat jangka pendek, karena bertujuan hanya untuk menolong masyarakat yang terkena dampak sementara akibat kebijaksanaan penyesuaian structural ekonomi, seperti: pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hak Kerja), akibat kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), dan lainnya. Kemudian, untuk program pengentasan kemiskinan adalah program jangka panjang yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah (Setiadi dan Kolip, 2011:814).

Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dibagi ke dalam tiga kelompok klaster yang dikelola oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah (TNP2K, 2009) yaitu:

1. Klaster I adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Program ini ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Program yang termasuk dalam klaster I adalah jamkesmas, program keluarga harapan, raskin, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Klaster II adalah kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan tidak hanya untuk melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. Karakteristik program ini adalah: a) menggunakan pendekatan partisipatif; b) penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; c) pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok; dan d) perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Cakupan program ini diklasifikasikan berdasarkan: wilayah dan sektor. Sedangkan penerima manfaat dari program adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin.

Program yang termasuk ke dalam klaster II adalah Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM).

3. Klaster III adalah kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Karakteristik dari program ini adalah: a) memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro; b) memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar; c) meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. Sedangkan yang menjadi penerima manfaat dari kelompok ini adalah masyarakat hampir miskin dan juga masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Program yang termasuk dalam klaster III adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat).

E. Program Raskin

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan termasuk komoditi penting yang dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945) dan kesepakatan internasional, salah satunya adalah *Millenium Development Goals (MDGs)* yang telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara akan menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Sebagaimana hal ini telah menjadi agenda pembangunan dunia yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan merupakan tujuan pembangunan millenium yang pertama. Agenda pembangunan tersebut terdiri atas 7 (tujuh) butir, yaitu: 1) memberantas kemiskinan ekstrem dan kelaparan; 2) mencapai pendidikan dasar universal; 3) meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; 4) mengurangi kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lain; dan 7) memastikan keberlanjutan lingkungan (Haughton dan Shahidur, 2012:270-271).

Sejak krisis pangan pada tahun 1998, pemerintah telah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). OPK memberikan subsidi beras kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Namun, pada tahun 2002 nama OPK diganti menjadi program beras untuk rumah tangga miskin (program Raskin) dengan tujuan agar lebih mempertajam sasaran penerima manfaat (Menko Kesra, 2013:4).

Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan yang ditujukan pada keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Secara umum, program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein, dan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan (Tabel 4).

Tabel 4. Tujuan, Sasaran, dan Indikator keberhasilan Program Raskin, 2013.

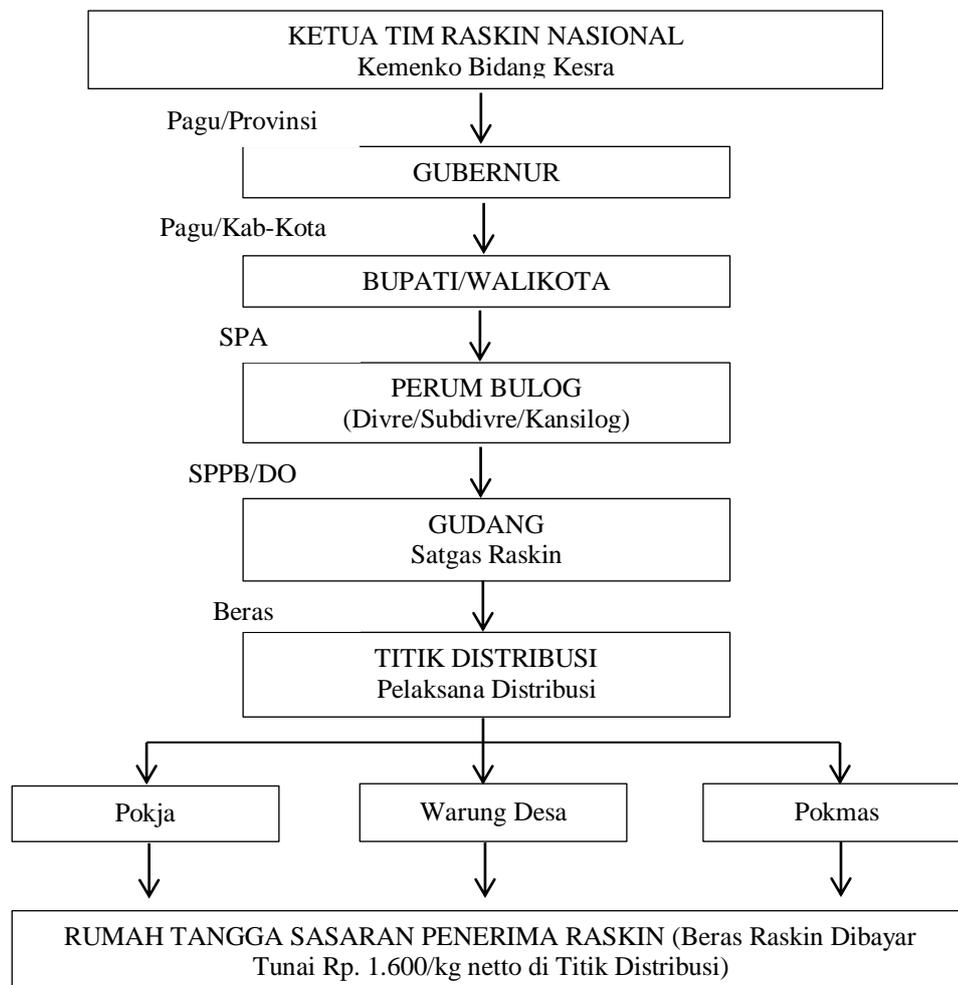
No	Variabel	Penjelasan
1.	Tujuan	Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras
2.	Sasaran	Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima beras dari program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K, disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan rumah tangga pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa / kelurahan / pemerintah setingkat
3.	Indikator	<p>a. Tepat sasaran penerima manfaat, yaitu Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1)</p> <p>b. Tepat jumlah, yaitu jumlah Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 15 kg/RTS/bulan</p> <p>c. Tepat harga, yaitu harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di titik distribusi</p> <p>d. Tepat waktu, yaitu waktu pelaksanaan distribusi /penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran</p> <p>e. Tepat administrasi, yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap</p> <p>f. Tepat kualitas, yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah</p>

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah (Menko Kesra, 2013:6):

1. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat
2. UU No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985
3. UU No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. UU No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan
6. UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013
7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
12. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
13. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
14. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Permenko Kesra No. 59 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat
16. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Penyaluran Raskin berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG, dalam hal ini kepada

Kadivreg/Kasubdivreg/Kansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Perum BULOG berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/*Delivery Order* (SPPB/DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker (Satuan Kerja) Raskin. Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi. Kemudian, di Titik Distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM (Penerima Manfaat) Raskin dilakukan oleh salah satu dari 3 (tiga) Pelaksana Distribusi Raskin yaitu Kelompok Kerja (Pokja), atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas). Pada saat di titik distribusi inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTS - PM ke pelaksana distribusi (Gambar 2).



Gambar 2. Alur Distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2013 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuklah Tim Koordinasi Raskin di pusat sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Penanggungjawab program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggungjawab pelaksanaan untuk tingkat provinsi adalah gubernur, di kabupaten/kota adalah bupati/walikota, di kecamatan adalah camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah atau kepala pemerintah setingkat (Menko Kesra, 2013:15).

Adapun serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan program Raskin sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Program Raskin 2013, sebagai berikut:

1. Penetapan pagu Raskin
2. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) melalui Musyawarah Desa (Mudes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel) atau Musyawarah Kecamatan (Muscam).
3. Peluncuran dan sosialisasi program Raskin
4. Monitoring dan evaluasi
5. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD) oleh BULOG
6. Penyaluran beras Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) dan dari Titik Bagi (TB) ke RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat)
7. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)
8. Pembiayaan meliputi biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Perum BULOG
9. Pengendalian, pengawasan dan pelaporan

Menurut Subagyo dalam Dewi., *dkk*, (2013:6), keberhasilan dapat dianalisa dengan menggunakan metode statistik sederhana, yaitu:

$$\text{Keberhasilan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Menurut Litbang Depdagri dalam Arnaya dan Made (2012:8) tingkatan keberhasilan suatu program terdiri atas 4 (empat), yaitu: 1) koefisien keberhasilan bernilai kurang dari 40 persen berarti kurang berhasil; 2) koefisien keberhasilan bernilai 40 persen sampai dengan 60 persen berarti cukup berhasil; 3) koefisien keberhasilan bernilai 61 sampai dengan 80 persen berarti berhasil; dan 4) koefisien keberhasilan bernilai diatas 80 persen berarti sangat berhasil (Tabel 5).

Tabel 5. Tingkatan Keberhasilan Program oleh Litbang Depdagri.

No	Persentase Tingkatan (%)	Keterangan
1.	< 40	Kurang berhasil
2.	40 – 60	Cukup berhasil
3.	61 – 80	Berhasil
4.	> 80	Sangat berhasil

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Raskin, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi seluruh instansi terkait dengan tetap mempertimbangkan beberapa nilai dasar atau prinsip-prinsip pelaksanaan, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap tindakan atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program Raskin (Bungkaes, *dkk.*, 2013:10). Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan program Raskin, yaitu:

1. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), maksudnya adalah mendorong RTM untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.
2. Transparansi, maksudnya adalah membuka akses informasi kepada pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin mengenai kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
3. Akuntabilitas, maksudnya adalah setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada semua pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas terkait pelaksanaan Raskin, maka keberhasilan yang dimaksud adalah dengan mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program Raskin dengan 6T yang terdiri atas tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi (Menko Kesra, 2013:37).

Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada pemerataan pendapatan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya adalah diimplementasikannya kebijakan/program bantuan pangan (beras) untuk masyarakat miskin agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, Myrdal dalam Bungkaes., *dkk.*, (2013:12) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan yang rendah akan mengakibatkan taraf hidup yang rendah. Selain itu, rendahnya pendapatan ditambah dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan produktifitas yang rendah, dan akhirnya tetap memiliki pendapatan yang rendah sehingga seseorang atau keluarga tertentu tidak mampu memiliki berbagai fasilitas dan sarana pembaharuan sebagai faktor penentu peningkatan kesejahteraan hidup keluarga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan yang memadai atau tinggi, tentu akan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Berkaitan dengan tujuan program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM), maka pendapatan yang seharusnya dikeluarkan untuk pangan (beras) sebagiannya dapat ditabung untuk kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya. Dengan demikian dapat dilihat adanya hubungan antara keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh oleh RTS.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu terkait pelaksanaan program Raskin, diantaranya adalah:

1. Penelitian Maryana (2011:105-106), dengan judul "*Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program Raskin dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program Raskin. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi program Raskin di Kelurahan Kabayan belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk faktor pendukungnya adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam mengambil beras, lokasi yang strategis, sedangkan faktor penghambatnya cukup banyak diantaranya: faktor ekonomi, kesadaran sebagai RTM masih rendah, biaya operasional yang belum maksimal, sumberdaya aparatur yang belum maksimal, beras yang berkualitas rendah, dan fungsi kontrol yang masih rendah.

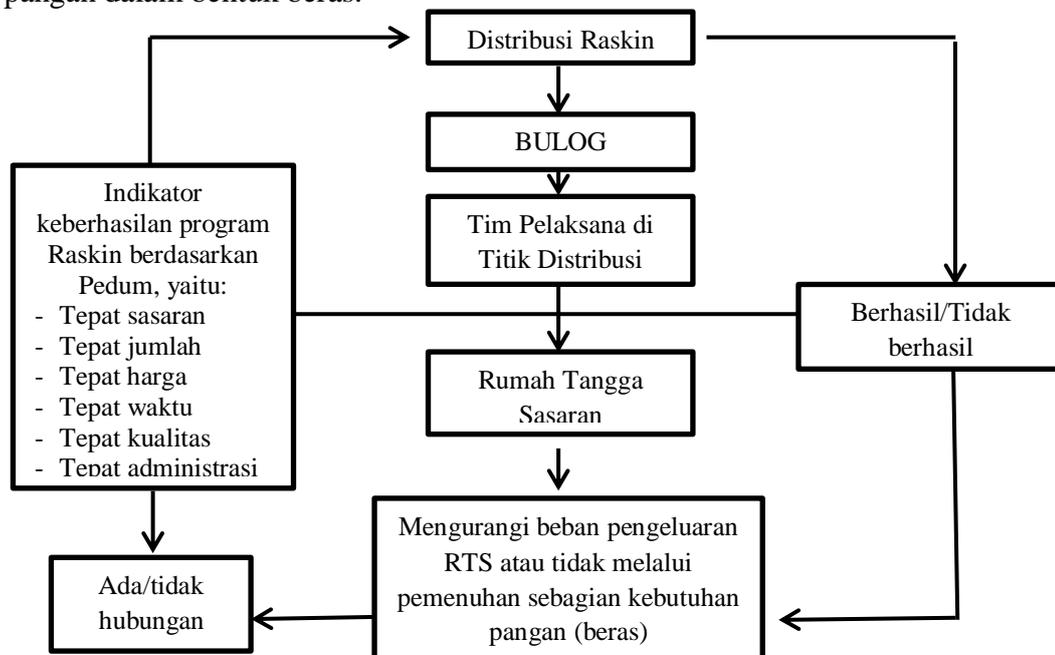
2. Penelitian Panjaya (2011:6), dengan judul "*Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus: Kelurahan Padurungan Kidul)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas data rumah tangga sasaran, mengetahui tanggapan masyarakat terhadap program Raskin, mengetahui ketepatan pelaksanaan program Raskin, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Raskin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program termasuk pada kriteria baik dan kendala terbesar adalah pembayaran beras yang kurang tertib dan tidak tepat waktu.
3. Penelitian Bungkaes, dkk, (2013:21-22), dengan judul "*Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pengelolaan program Raskin dan tingkat kesejahteraan masyarakat dan untuk menganalisis apakah tingkat kesejahteraan masyarakat turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan program Raskin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan program Raskin belum secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya RTM sebagai penerima manfaat program masih berada pada kategori "sedang" atau menengah. Serta terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan RTM antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program Raskin, di mana tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik/tinggi dibanding tingkat kesejahteraan RTM sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan nyata antara

efektivitas pengelolaan program Raskin dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yaitu program raskin, sedangkan perbedaannya adalah pada tujuan penelitian yaitu mengetahui tingkat keberhasilan dan manfaat program raskin di tingkat rumah tangga, serta menganalisis hubungan antara keberhasilan dan manfaat program tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis meneliti mengenai keberhasilan program Raskin dan manfaatnya bagi RTS-PM di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang pertama, penulis menggunakan indikator 6T untuk mengukur tingkat keberhasilan program Raskin yang telah ditetapkan pada Pedoman Umum Raskin tahun 2013 yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Kemudian, untuk melihat manfaat program Raskin, penulis menggunakan pendekatan berdasarkan tujuan dari program yaitu mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Evaluasi Keberhasilan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Daerah penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Sumatera Barat pada tahun 2013 (Lampiran 2).
2. Kabupaten Pesisir Selatan masih mengalami beberapa kendala dan masalah dalam penyaluran/distribusi Raskin pada tahun 2013, salah satunya adalah penunggakan pembayaran hasil penjualan Raskin terbesar tahun 2013 di Sumatera Barat (Lampiran 4).
3. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara pada umumnya adalah pertanian, yaitu sekitar 1.419 rumah tangga atau 93 persen dari rumah tangga yang ada yaitu 1.525 rumah tangga.
4. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara memiliki persentase rumah tangga penerima program Raskin paling tinggi yaitu 51 persen atau 778 RTS dari jumlah rumah tangga yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa persentase rumah tangga penerima Raskin di daerah ini lebih tinggi daripada persentase rumah tangga daerah lainnya (Lampiran 6).

Penelitian ini telah dilakukan selama lebih kurang satu bulan sejak tanggal 03 September sampai dengan 02 Oktober 2014.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian *deskriptif*, dengan menggunakan metode survei yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau daerah (Hasan, 2010:8). Dalam metode survei juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam

menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang (Nazir, 2005:56).

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti telah melakukan survei kepada beberapa RTS-PM program Raskin yang berada di lokasi penelitian dan menjadikannya sebagai objek penelitian langsung guna memperoleh data dan informasi mengenai keberhasilan serta manfaat program Raskin.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sangadji dan Sopiah, 2010:185-186).

Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah semua Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berjumlah 778 RTS, yang tersebar pada 6 Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (Tabel 6). Populasi penelitian ini adalah rumah tangga yang mempunyai karakteristik seperti: a) rumah tangga penerima raskin, b) masih memiliki ketergantungan pada bidang pertanian.

Tabel 6. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin pada Setiap Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2013.

No	Titik Distribusi/Nagari	Jumlah RTS-PM
1.	Puluik-puluik	74
2.	Puluik-puluik Selatan	133
3.	Koto Ranah	92
4.	Muaro Aie	46
5.	Pancung Taba	208
6.	Limau Gadang Pc. Taba	225
	Jumlah	778

Sumber: Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, 2013.

Daerah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan teknik *Cluster Sampling (area sampling)* karena daerah penelitian terdiri dari beberapa nagari

yang memiliki banyak populasi (RTS) dengan karakteristik yang sama. Penelitian ini dilakukan pada satu nagari dengan ketentuan nagari yang memiliki populasi terbanyak karena dianggap bisa mewakili populasi lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditetapkan bahwa daerah sampel pada penelitian ini adalah Nagari Limau Gadang Pc. Taba dengan populasi 225 RTS (Lampiran 8). Selanjutnya untuk menentukan ukuran sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin (Sangadji dan Sopiah, 2010:189) berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N = Populasi

n = Ukuran sampel

e^2 = Tingkat kepercayaan karena kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan/ditolerir. Pada penelitian ini tingkat kesalahan yang digunakan adalah 10%, karena adanya keterbatasan dana, waktu dan tenaga peneliti.

Maka,

$$n = \frac{225}{1 + (225)(0,1)^2} \longrightarrow n = \frac{225}{3,25} \longrightarrow n = 69 \text{ RTS}$$

Nagari Limau Gadang Pc. Taba terdiri dari 2 (dua) kampung yaitu Limau-limau dan Ngalau Gadang, masing-masingnya memiliki populasi RTS-PM sebanyak 124 RTS dan 101 RTS. Untuk mendapatkan informasi mengenai keberhasilan dan manfaat program di daerah penelitian, maka peneliti telah mengambil sampel sebanyak 38 RTS di Kampung Limau-limau dan 31 RTS di Kampung Ngalau Gadang (Lampiran 9). Sampel dipilih secara acak (*random*) dengan menggunakan metode undian, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Membuat list populasi RTS-PM masing-masing kampung dan memberikan nomor pada masing-masingnya
2. Tulis setiap nomor pada secarik kertas dan gulung, kemudian masukan kedalam sebuah kotak dan kocok
3. Ambil satu persatu gulungan kertas sampai jumlah yang diinginkan untuk dijadikan sampel

Selanjutnya untuk mengklarifikasi hasil temuan di lapangan terkait keberhasilan program Raskin dan manfaatnya bagi RTS, maka pada penelitian ini ditambahkan *key informan* yang terdiri atas: 1 orang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, 1 orang Wali Nagari Limau Gadang Pc. Taba dan 1 orang petugas pelaksana penyaluran Raskin di Nagari Limau Gadang Pc. Taba.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hasan (2010:19), data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lainnya.

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasan (2010:19) mengemukakan mengenai pengertian, metode dan teknik pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan (*observasi*) dan wawancara menggunakan daftar pertanyaan atau kuisisioner, serta dibantu dengan panduan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen resmi yang relevan dengan pelaksanaan penyaluran Raskin terutama di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2013. Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari Pedum Raskin tahun 2013, laporan, jurnal, majalah, buletin, publikasi yang diterbitkan secara periodik, buku/studi kepustakaan, BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan, dan penelitian terdahulu.

E. Variabel Penelitian

Nazir (2005:123) mendefinisikan variabel sebagai konsep yang mempunyai bermacam nilai. Sedangkan Direktorat Perguruan Tinggi Depdikbud dalam Nabuko dan Abu Achmadi (2004:118) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian. Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Tingkat keberhasilan program Raskin bagi setiap RTS di daerah penelitian, dinilai dengan menggunakan indikator keberhasilan berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2013, yaitu:
 - a. Tepat sasaran, diukur dengan menggunakan variabel kriteria rumah tangga miskin oleh BPS karena data RTS-PM tahun 2013 diperoleh dari hasil pendataan BPS. Terdapat 7 variabel kriteria rumah tangga miskin, namun batas yang digunakan untuk menetapkan suatu rumah tangga itu digolongkan miskin adalah apabila rumah tangga tersebut mempunyai minimal 5 (lima) kriteria kemiskinan. Berikut adalah variabel kriteria rumah tangga miskin, dengan ketentuan skor 1 untuk mencirikan kemiskinan dan skor 0 untuk ketidakmiskinan, yaitu:
 - i. Luas lantai per kapita : $\leq 8 \text{ m}^2$ (skor 1) dan $> 8 \text{ m}^2$ (skor 0)
 - ii. Jenis lantai : tanah (skor 1) dan bukan tanah (skor 0)
 - iii. Air minum atau ketersediaan air bersih : air hujan/sumur tak terlindung (skor 1) dan ledeng/PAM/sumur terlindung (0)
 - iv. Kepemilikan asset (sepeda motor, emas, ternak, dan barang lainnya yang bisa dijual dengan harga Rp. 500.000) : tidak punya asset (skor 1) dan punya asset (skor 0)
 - v. Pendapatan total per bulan : $\leq \text{Rp. } 350.000$ (skor 1) dan $> \text{Rp. } 350.000$ (skor 0)
 - vi. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk beras) : > 80 persen (skor 1) dan < 80 persen (skor 0)
 - vii. Konsumsi lauk pauk (daging/ikan/telur/ayam) satu kali dalam seminggu : tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1) dan ada, bervariasi (skor 0)

- b. Tepat jumlah, apabila jumlah beras yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah sebanyak ≥ 15 kg/RTS/bulan.
 - c. Tepat harga, apabila harga Raskin yang diterima dan dibayarkan oleh RTS adalah sebesar Rp. 1.600/kg.
 - d. Tepat waktu, apabila waktu penyaluran Raskin yang telah direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya yaitu RTS menerima Raskin sebanyak ≥ 15 kali pada tahun 2013.
 - e. Tepat kualitas, apabila terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras yang telah ditetapkan pemerintah yaitu beras yang dibagikan berkualitas medium dengan aturan kadar air tidak lebih 14 persen dan tidak boleh lebih dari 20 persen yang patah serta derajat kebersihan harus 90 persen, tidak apek, tidak berbau dan tidak berketu.
 - f. Tepat administrasi, apabila pembayaran Raskin yang diterima oleh RTS dilakukan secara lunas setelah Raskin dibagikan.
2. Tingkat manfaat program Raskin bagi setiap RTS di daerah penelitian, dinilai dengan menggunakan pendekatan tujuan dari program yaitu mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Adapun indikator yang digunakan adalah:
- a. Jumlah beras yang diterima RTS
 - b. Harga Raskin yang diterima RTS
 - c. Harga beras yang berlaku di pasar
 - d. Jumlah anggota keluarga
 - e. Jumlah konsumsi beras per-kapita/bulan

F. Analisa Data

Menurut Patton dalam Hasan (2010:29-30), analisis data adalah proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk memecahkan masalah penelitian, memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian, memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian, dan bahan untuk membuat kesimpulan untuk penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kuantitatif*. Metode kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan gejala sosial yang berkaitan dengan keberhasilan program Raskin dan manfaatnya bagi RTS di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

1. Mengetahui tingkat keberhasilan program Raskin di setiap RTS, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Subagyo dalam Dewi., *dkk*, 2013:6):

$$\text{Keberhasilan program} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Target}}$$

Keterangan:

Realisasi = Jumlah ketepatan yang dicapai RTS

Target = Jumlah ketepatan yang seharusnya dicapai RTS

Berikut adalah kategori tingkat keberhasilan menurut Litbang Depdagri dalam Arnaya dan Made (2012:8) :

< 40 % : kurang berhasil

40 – 60 % : cukup berhasil

61 – 80 % : berhasil

> 80 : sangat berhasil

2. Mengetahui tingkat manfaat program Raskin di setiap RTS dengan menggunakan pendekatan per kapita karena adanya perbedaan jumlah anggota keluarga dan besar kebutuhan beras per rumah tangga yang mempengaruhi tingkat manfaat yang diperoleh RTS.

- a. Menentukan jumlah konsumsi beras dan besar pengeluaran per kapita per bulan di tingkat rumah tangga, apabila tidak menerima raskin.

$$C = \frac{\text{Rata-rata konsumsi beras per rumah tangga (kg/bulan)}}{\text{Jumlah anggota keluarga (orang)}}$$

Maka, besar pengeluaran/kapita/bulan untuk konsumsi beras adalah:

$$\text{Pengeluaran} = \text{Pa} \times \text{C}$$

Keterangan:

Pengeluaran = Besar pengeluaran untuk konsumsi beras rumah tangga sebelum menerima Raskin (Rp/bulan)

Pa = Harga beras di pasar (Rp/kg)

C = Jumlah konsumsi beras per kapita (Kg/bulan)

- b. Menghitung besar pengurangan beban pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga setelah menerima Raskin. Dalam teori ekonomi, pengurangan beban pengeluaran tersebut sama dengan '*surplus konsumen*' (Boediono, 1999:29), karena konsumen (RTS) yang menikmati manfaat dari program tersebut:

$$Sk = \frac{(Pa - Pk) \times Q}{\text{Jumlah anggota keluarga}}$$

Keterangan:

Sk = Surplus konsumen (Rp)

Pa = Harga beras di pasar (Rp/kg)

Pk = Harga Raskin yang diterima RTS-PM (Rp/kg)

Q = Jumlah Raskin yang diterima RTS-PM (Kg)

- c. Hitung persentase tingkat manfaat program dalam pengurangan beban pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga dengan menggunakan rumus:

$$\text{Manfaat program} = \frac{(Pa - Pk) \times Q / \text{jumlah anggota} \times 100\%}{Pa \times C}$$

Berikut adalah kategori tingkat manfaat program raskin, yaitu:

< 40 % : kurang bermanfaat

40 – 60 % : cukup bermanfaat

61 – 80 % : bermanfaat

> 80 : sangat bermanfaat

3. Menganalisis ada atau tidak hubungan antara tingkat keberhasilan program Raskin (X) dengan tingkat manfaat yang diperoleh oleh Rumah Tangga Sasaran (Y) di daerah penelitian. Untuk memperoleh tujuan ketiga pada penelitian ini, maka hasil dari tujuan 1 (satu) dan 2 (dua) akan dianalisa dengan langkah sebagai berikut:

- a. Analisis *Kai-Kwadrat (Chi-Square Test)* untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X (*independen*) dengan variabel Y (*dependen*). Analisis *chi-square* dilakukan berdasarkan tabulasi silang

antara data kedua variabel tersebut (Tabel 7). Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis ini adalah (Djarwanto dan Subagyo, 1993:243-244):

- i. Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif
 H_0 : Tidak ada hubungan antara keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh RTS
 H_1 : Ada hubungan antara keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh RTS
- ii. Memilih *level of significance* tertentu (α) dengan d.f (r-1)(k-1), dengan r adalah baris dan k adalah kolom. Pada penelitian ini menggunakan taraf uji 1% dengan tingkat kepercayaan 99%. Maka besar $\chi^2_{|0,01;(4-1)(4-1)} = \chi^2_{|0,01;9)} = 21,666$ (Tabel χ^2).
- iii. Kriteria pengujian:
 H_0 diterima apabila $\chi^2 \leq 21,666$
 H_0 ditolak apabila $\chi^2 > 21,666$
- iv. Perhitungan:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

Dengan:

$$e_{ij} = \frac{(n_i)(n_j)}{n}$$

- v. Kesimpulan: apakah H_0 diterima (variabel satu tidak berhubungan dengan variabel lain) atau H_0 ditolak (variabel satu berhubungan dengan variabel lain).

Tabel 7. Tabulasi Silang antara Keberhasilan dan Manfaat Program Raskin

Kategori Variabel Keberhasilan Program Raskin (X)	Manfaat Program Raskin (Y)				Jumlah
	Sangat Bermanfaat	Bermanfaat	Cukup Bermanfaat	Kurang Bermanfaat	
Sangat Berhasil	n_{ij}	n_{ij}	n_{ij}	n_{ij}	n_i
Berhasil	n_{ij}	n_{ij}	n_{ij}	n_{ij}	n_i
Cukup Berhasil	n_{ij}	n_{ij}	n_{ij}	n_{ij}	n_i
Kurang Berhasil	n_{ij}	n_{ij}	n_{ij}	n_{ij}	n_i
Jumlah	n_j	n_j	n_j	n_j	n

- b. Analisis Koefisien Kontingensi (KK) untuk mengetahui/mengukur tingkat keeratan (derajat) hubungan antara kedua variabel yang diuji. Koefisien kontingensi dihitung berdasarkan nilai *chi-square* hasil analisis data. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hasan, 2010:46):

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}}$$

Keterangan:

C = Koefisien Kontingensi (KK)

χ^2 = Kai Kwadrat (*Chi-Square Test*)

N = Jumlah Data

Setelah nilai koefisien kontingensi diperoleh, maka untuk menginterpretasikan keeratan hubungan/korelasi antar variabel dapat digunakan koefisien korelasi dan kekuatan hubungan yang telah ditetapkan (Tabel 8). Hasan (2010:44) mengemukakan beberapa nilai-nilai koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 8. Interval Koefisien Korelasi dan Kekuatan Hubungan Antar Variabel.

No	Interval Nilai	Kekuatan Hubungan
1.	KK = 0,00	Tidak ada
2.	0,00 < KK ≤ 0,20	Sangat rendah atau lemah sekali
3.	0,20 < KK ≤ 0,40	Rendah atau lemah tapi bisa
4.	0,40 < KK ≤ 0,70	Cukup berarti atau sedang
5.	0,70 < KK ≤ 0,90	Tinggi atau kuat
6.	0,90 < KK ≤ 1,00	Sangat tinggi atau kuat sekali, dapat diandalkan
7.	KK = 1,00	Sempurna

G. Definisi Operasional

- Keberhasilan program Raskin adalah tercapainya target 6T (enam tepat) yang telah ditetapkan dalam Pedum Raskin tahun 2013, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas.
- Tepat sasaran adalah Raskin diberikan kepada rumah tangga yang memiliki minimal 5 (lima) dari 7 (tujuh) variabel kriteria rumah tangga miskin oleh BPS yaitu a) luas lantai per kapita, b) jenis lantai, c) air minum/ketersediaan air bersih, d) kepemilikan asset, e) pendapatan total per bulan, f) pengeluaran

(persentase pengeluaran untuk beras), g) konsumsi lauk pauk (daging/ikan/telur/ayam) satu kali dalam seminggu.

3. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk beras) rumah tangga > 80 persen adalah rumah tangga yang menggunakan lebih dari 80 persen pendapatan totalnya untuk mengkonsumsi beras, yang mencirikan keadaan rumah tangga miskin. Sedangkan, pengeluaran (persentase pengeluaran untuk beras) rumah tangga < 80 persen adalah rumah tangga yang menggunakan kurang dari 80 persen pendapatan totalnya untuk mengkonsumsi beras, yang mencirikan keadaan rumah tangga yang tidak miskin.
4. Tepat jumlah adalah beras yang diterima oleh RTS sebanyak ≥ 15 kg/RTS/bulan.
5. Tepat harga adalah harga Raskin yang diterima dan dibayarkan oleh RTS sebesar Rp. 1.600/kg.
6. Tepat waktu adalah waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS sesuai dengan rencana penyaluran pada tahun 2013 sebanyak ≥ 15 kali.
7. Tepat administrasi adalah setiap RTS membayar Raskin yang diterima secara lunas setelah beras dibagikan.
8. Tepat kualitas adalah beras yang dibagikan berkualitas medium dengan aturan tidak banyak beras yang patah, bersih, tidak apek, tidak berbau dan tidak berketu.
9. Manfaat program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam memenuhi kebutuhan konsumsi beras yang dihitung dengan mengkalikan selisih antara harga beras tertinggi di pasar dan harga Raskin yang diterima RTS dengan jumlah Raskin yang diterima RTS.
10. Rumah Tangga (RT) adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama. Sehingga dalam satu rumah tangga bisa terdiri dari lebih satu keluarga.
11. Kepala Keluarga (KK) adalah seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari.
12. RTS (Rumah Tangga Sasaran) adalah rumah tangga yang tergolong sangat miskin dan miskin yang menjadi sasaran dari program, dan ditetapkan berdasarkan Kepala Keluarga (KK).

Tabel 9. Matriks Data Set Penelitian.

Tujuan	Hipotesis	Variabel	Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Analisa Data
Mengetahui tingkat keberhasilan program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	-	Keberhasilan program Raskin	a. Tepat sasaran b. Tepat jumlah c. Tepat harga d. Tepat waktu e. Tepat kualitas f. Tepat administrasi	Wawancara menggunakan kuisisioner, serta observasi	RTS-PM	Analisis Deskriptif kuantitatif
Mengetahui tingkat manfaat program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	-	Manfaat program	a. Jumlah beras yang diterima RTS b. Harga Raskin yang diterima RTS c. Harga beras yang berlaku di pasar d. Jumlah anggota keluarga e. Jumlah kebutuhan konsumsi beras per orang perbulan	Wawancara menggunakan kuisisioner	RTS-PM	Analisis Deskriptif kuantitatif
Menganalisis hubungan antara keberhasilan program dengan manfaat program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	H_0 : tidak ada hubungan antara keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh RTS H_1 : ada hubungan antara keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh RTS	Hubungan keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh RTS	Data dari tujuan 1 (satu) dan 2 (dua)	-	-	Metode analisis chi-square dan analisis koefisien kontingensi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Keadaan fisik dan geografi

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara secara geografis terletak antara 1^o03,5' – 1^o13,5' Lintang Selatan dan 100^o31,5 – 100^o45' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 252 km² dan tersebar pada 6 nagari yang terdiri dari kenagarian Puluik-puluik, kenagarian Puluik-puluik Selatan, kenagarian Koto Ranah, kenagarian Muaro Aie, kenagarian Pancung Taba dan kenagarian Limau Gadang (Tabel 10).

Tabel 10. Luas Daerah menurut Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

No	Nagari	Luas Daerah (Km ²)	Persentase
1.	Puluik-puluik	36	14,28
2.	Puluik-puluik Selatan	33	13,10
3.	Koto Ranah	48	19,05
4.	Muaro Aie	24	9,52
5.	Pancung Taba	41	16,27
6.	Limau Gadang	70	27,78
Jumlah		252	100,00

Sumber: Kantor Camat kecamatan IV Nagari Bayang Utara, 2013.

Jika dilihat dari sudut penggunaan lahan, kecamatan IV Nagari Bayang Utara saat ini masih diliputi oleh kawasan hutan. Luas kawasan hutan di daerah ini mencapai 57,84 persen dari luas daerah. Sedangkan luas lahan untuk budidaya pertanian sebesar 38,20 persen, lahan untuk perumahan/pemukiman dan halaman sekitarnya sebesar 1,34 persen, dan sisanya sebesar 2,62 persen terdiri dari semak/alang-alang/rawa-rawa dan lainnya (Tabel 11). Adapun batas-batas wilayah dari kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Solok
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan IV Jurai
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bayang
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Koto IX Tarusan

Tabel 11. Luas Lahan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013 menurut Jenis dan Penggunaannya.

No	Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Luas Sawah	750	2,99
2.	Bangunan dan Halaman Sekitarnya	337	1,34
3.	Tegal, Kebun	1.402	5,59
4.	Ladang, Huma	1.601	6,39
5.	Pengembalaan, Padang Rumput	24	0,10
6.	Sementara Tidak Diusahakan	419	1,67
7.	Ditanami Pohon/Gutan Rakyat	362	1,44
8.	Hutan Negara	14.141	56,40
9.	Perkebunan	5.964	23,79
10.	Lahan Kering Lainnya	67	0,27
11.	Rawa-rawa	0	0,00
12.	Tebat/Kolam/Empang	7	0,03
Jumlah		25.074	100,00

Sumber: BPS kabupaten Pesisir Selatan, 2014.

Keadaan topografi daerah kecamatan IV Nagari Bayang Utara ini adalah berbukit-bukit sebagai perpanjangan dari bukit barisan, yang terletak pada ketinggian 20-200 m dari permukaan laut.

2. Keadaan penduduk

Penduduk di kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2013 tercatat sekitar 1.525 Rumah Tangga (RT) dengan jumlah penduduk sebanyak 7.312 jiwa, yang terdiri dari 3.487 jiwa laki-laki (48%) dan 3.825 jiwa perempuan (52%). Dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah 29,16 jiwa per km², terlihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kenagarian Puluik-puluik Selatan yaitu 53,93 jiwa per km², sedangkan yang terendah terdapat di Kenagarian Limau Gadang yaitu hanya 16,32 jiwa per km² (Tabel 12).

Tabel 12. Jumlah Penduduk di kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2013.

No	Nagari	Penduduk (Jiwa)		Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Per Km ²
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Puluik-puluik	437	493	930	26,18
2.	Puluik-puluik Selatan	794	964	1.758	53,93
3.	Koto Ranah	582	562	1.144	23,73
4.	Muaro Aie	198	192	390	16,39
5.	Pancung Taba	897	1.057	1.954	47,64
6.	Limau Gadang	579	557	1.136	16,32
Jumlah		3.487	3.825	7.312	29,16

Sumber: Kantor Camat kecamatan IV Nagari Bayang Utara, 2013.

Dari Tabel 12 di atas, dapat dilihat bahwa nagari yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berada di Kenagarian Pancung Taba yaitu sebanyak 1.954 jiwa, dan penduduk paling sedikit berada di Kenagarian Muaro Aie dengan jumlah 390 jiwa.

Pada tahun 2013, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sekitar 2.136 KK, yang terbagi pada 5 (lima) tingkat kesejahteraan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 53 KK, Keluarga Sejahtera I sebanyak 926 KK, Keluarga Sejahtera II sebanyak 469 KK, Keluarga Sejahtera III sebanyak 551 KK, dan Keluarga Sejahtera III/Plus sebanyak 137 KK (Tabel 13).

Kaitan tingkat kesejahteraan keluarga dengan program Raskin adalah program Raskin merupakan program yang diberikan kepada rumah tangga yang berada pada tingkat kesejahteraan Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Pada Tabel 13, dapat dilihat bahwa jumlah KK yang berada pada tingkat kesejahteraan tersebut adalah sebanyak 979 KK (53+926). Namun, jumlah KK yang menerima Raskin di daerah ini adalah sebanyak 778 KK atau 94 % dari KK yang ada, dan selanjutnya disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Tabel 13. Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Per Nagari tahun 2013.

No	Nagari	Jumlah KK Sesuai Tingkat Kesejahteraan					Total
		Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III/Plus	
1.	Puluik-puluik	29	125	180	138	69	541
2.	Puluik-puluik Selatan	3	97	136	282	25	543
3.	Koto Ranah	12	128	53	71	22	286
4.	Muaro Aia	3	49	32	33	3	120
5.	Pancung Taba	2	226	56	15	18	317
6.	Limau Gadang	4	301	12	12	0	329
	Total	53	926	469	551	137	2136

Sumber: Pengelola KB Desa/Kelurahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga yang berada pada tingkat kesejahteraan Pra Sejahtera dan Sejahtera I paling banyak adalah di Nagari Limau Gadang yaitu 305 KK, sedangkan nagari yang memiliki jumlah kepala keluarga paling sedikit pada tingkat kesejahteraan tersebut adalah Nagari Muaro Aia yaitu 52 KK.

Secara umum, masyarakat di daerah ini memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dan peternakan. Pada bidang pertanian, jenis tanaman yang diusahakan diantaranya, tanaman pangan (padi, palawija, dan kacang tanah), tanaman hortikultura (sayur-sayuran), dan juga tanaman perkebunan rakyat (karet, coklat, dan kayu manis). Sedangkan, pada bidang peternakan, jenis ternak yang diusahakan adalah sapi, kuda, kerbau, kambing, ayam pedaging, ayam buras, dan itik. Disamping itu, juga terdapat beberapa penduduknya bekerja sebagai PNS dan pedagang, namun hanya dalam jumlah yang sedikit.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada akan mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Semakin baik dan lengkap sarana dan prasarana pendukung maka akan mempercepat laju perkembangan daerah tersebut. Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sudah terpenuhi, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama, transportasi dan keuangan (Tabel 14). Berikut adalah jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2013:

Tabel 14. Sarana dan Prasarana di Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
1.	TK	3
	Play Group	7
	SD	8
	SMP	2
	SMA	1
	MIN	2
	MTsN	2
2.	Puskesmas	1
	Puskesmas Pembantu	4
3.	Mesjid	15
	Musholla	14
4.	Koperasi KUD	1
	Koperasi Non KUD	3
5.	Jembatan	7
Jumlah		70

Sumber: Kantor Camat kecamatan IV Nagari Bayang Utara, 2013.

B. Karakteristik Sampel

Karakteristik sampel pada penelitian ini meliputi: umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan, pekerjaan kepala keluarga, waktu dan status penerimaan raskin.

Tabel 15. Karakteristik Rumah Tangga Sampel Penerima Raskin tahun 2013.

No	Karakteristik Sampel	Jumlah RTS	(%)
1.	Umur, terdiri dari:		
	a. < 30 tahun	4	6
	b. 30 – 50 tahun	45	65
	c. > 50 tahun	20	29
2.	Tingkat Pendidikan, terdiri dari:		
	a. SD	55	80
	b. SMP	8	11
	c. SMA/SLTA/Sederajat	2	3
	d. Perguruan Tinggi	0	0
	e. Tidak Sekolah	4	6
3.	Jumlah Tanggungan Keluarga, terdiri dari:		
	a. < 3 orang	17	25
	b. 3 – 5 orang	45	65
	c. > 5 orang	7	10
4.	Pendapatan total, terdiri dari:		
	a. ≤ Rp. 350.000 / bulan	33	48
	b. > Rp. 350.000 / bulan	36	52
5.	Pekerjaan Kepala Keluarga, terdiri dari:		
	a. Petani	53	77
	b. Pedagang	0	0
	c. PNS	0	0
	d. Lain-lain	16	23
6.	Waktu Mulai Menerima Raskin, terdiri dari:		
	a. Tahun 2004	45	65
	b. Tahun 2005	1	2
	c. Tahun 2006	3	4
	d. Tahun 2008	17	25
	e. Tahun 2010	3	4
7.	Status Sampel sebagai Penerima Raskin, terdiri dari:		
	a. Masih Menerima	69	100
	b. Tidak Menerima	0	0

Dari Tabel 15 diatas, dapat dilihat pada karakteristik umur, jumlah sampel paling banyak berada pada kelompok umur 30-50 tahun yaitu sebanyak 45 orang (65%), artinya masyarakat yang mendapatkan bantuan Raskin masih berada dalam kategori umur produktif sehingga masih besar potensi tenaga yang dimiliki untuk bekerja agar memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Sedangkan, pada karakteristik tingkat pendidikan, jumlah sampel paling banyak berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 55 orang (80%), artinya masyarakat yang berada di daerah ini masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dilihat dari karakteristik jumlah tanggungan keluarga, jumlah sampel paling banyak memiliki tanggungan 3 – 5 orang yaitu 45 orang (65%). Pada karakteristik pendapatan total, jumlah sampel paling banyak berada pada kategori pendapatan > Rp. 350.000/bulan yang berkisar antara Rp. 400.000 – Rp. 800.000 yaitu sebanyak 36 orang (52%), namun pendapatan masyarakat di daerah ini masih termasuk kedalam kategori rendah karena nilai pendapatan tersebut berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat pada tahun 2013 yaitu Rp. 1.350.000/bulan.

Selanjutnya, rata-rata sampel di daerah penelitian memiliki pekerjaan sebagai petani yaitu sebanyak 53 orang (77%), artinya masyarakat di daerah ini masih menggantungkan hidupnya kepada bidang pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adapun jenis komoditi yang diusahakan adalah padi sawah, cabe rawit, cabe merah, kulit manis, damar, dan jahe. Berkaitan dengan program Raskin, rata-rata rumah tangga yang dijadikan sampel mulai menerima Raskin sejak tahun 2004 yaitu sebanyak 45 rumah tangga (65%) dan semua rumah tangga tersebut sampai saat ini masih berstatus sebagai penerima Raskin yaitu 69 rumah tangga (100%).

Berdasarkan karakteristik sampel diatas, dapat dianalisis penyebab kemiskinan masyarakat di daerah penelitian, diantaranya: 1) karakteristik wilayah yang terpencil dan memiliki akses yang buruk pada pasar, menyebabkan rendahnya harga yang diperoleh petani dan tingginya harga yang mereka bayarkan atas pembelian karena tingginya biaya transportasi merupakan penyebab kerentanan pangan diantara masyarakat, 2) karakteristik rumah tangga yang mencakup, tingginya jumlah anggota keluarga, struktur pekerjaan dan pendapatan yang didominasi pada bidang pertanian, serta pendidikan yang rendah. Hal ini termasuk pada jenis kemiskinan natural dan kemiskinan struktural, sebagai akibat adanya ketidakseimbangan, pemilikan sumber daya yang tidak merata, serta

adanya kesempatan yang tidak sama yang menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan berbagai program upaya penanggulangan kemiskinan.

C. Analisa Tingkat Keberhasilan Program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

1. Ketepatan sasaran

Program Raskin adalah salah satu Program Perlindungan Sosial yang ditujukan kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan (berpendapatan rendah). Penetapan RTS-PM program Raskin sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), setelah dilakukannya pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel (Menko Kesra, 2013:37). Di dalam Pedum Raskin 2013, ketepatan sasaran diartikan bahwa Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdaftar sesuai data PPLS 2011 tersebut. Dalam menentukan suatu rumah tangga miskin atau tidak, BPS menggunakan 7 (tujuh) variabel yang dianggap layak dan operasional untuk dijadikan informasi dalam penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan dengan ketentuan suatu rumah tangga dikategorikan miskin apabila rumah tangga tersebut mempunyai minimal 5 (lima) ciri kemiskinan. Variabel-variabel tersebut digunakan pada penelitian ini sebagai pedoman untuk mengklarifikasi kembali mengenai ketepatan sasaran dari program Raskin di daerah penelitian. Oleh karena itu, program Raskin dikatakan tepat sasaran apabila rumah tangga sampel mempunyai minimal 5 (lima) dari 7 (tujuh) ciri kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa ternyata tidak semua rumah tangga sampel mempunyai ≥ 5 (lima) ciri kemiskinan (Lampiran 10). Ketidaktepatan variabel kemiskinan yang dimiliki oleh rumah tangga sampel paling banyak terdapat pada variabel jenis lantai rumah, yaitu sebanyak 60 RTS (87%) dari rumah tangga sampel memiliki lantai rumah bukan tanah. Sedangkan ketepatan variabel kemiskinan yang dimiliki oleh rumah tangga sampel paling banyak terdapat pada variabel air minum/ketersediaan air bersih, yaitu sebanyak 69 RTS (100%) dari rumah tangga sampel memiliki sumber air yang berasal dari air hujan/sumur tak terlindung (Tabel 16).

Tabel 16. Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga Sampel.

No	Variabel Kemiskinan	Tepat		Tidak Tepat	
		RT	%	RT	%
1.	Luas lantai per kapita : $< 8m^2$	34	49	35	51
2.	Jenis lantai rumah : tanah	9	13	60	87
3.	Air minum/ketersediaan air bersih : air hujan	69	100	0	0
4.	Kepemilikan asset : tidak punya asset	33	48	36	52
5.	Pendapatan total per bulan : $< Rp. 350.000$	33	48	36	52
6.	Persentase pengeluaran untuk beras : $> 80\%$	14	20	55	80
7.	Konsumsi lauk pauk dalam seminggu : tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi	36	52	33	48

Data pada Tabel 16 menunjukkan bahwa, rumah tangga yang menjadi sasaran dari program Raskin banyak yang tidak memenuhi ≥ 5 (lima) ciri kemiskinan. Perubahan karakteristik RTS menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya ketidaktepatan tersebut, sehingga perlu dilakukan pendataan ulang kembali dalam menetapkan rumah tangga sasaran agar tujuan dan sasaran dari program Raskin dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana kebijakan penetapan RTS-PM yang dinyatakan di dalam Pedum Raskin 2013, bahwa untuk mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel/Muscam (Menko Kesra, 2013:25).

Tabel 17. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Raskin tahun 2013.

No	Keterangan	Jumlah RT	Persentase (%)
1.	Tepat Sasaran (≥ 5 variabel)	14	20
2.	Tidak Tepat Sasaran (< 5 variabel)	55	80
Jumlah		69	100

Berdasarkan data pada Tabel 17, diperoleh informasi bahwa rumah tangga yang termasuk pada kategori tepat sasaran yaitu terpenuhinya minimal 5 (lima) ciri kemiskinan adalah sebanyak 14 rumah tangga (20%) dari rumah tangga yang dijadikan sampel, sedangkan 55 rumah tangga lainnya (80%) termasuk pada kategori tidak tepat sasaran karena memiliki < 5 (lima) ciri kemiskinan.

Selanjutnya, hasil analisis data mengenai ketepatan rumah tangga sasaran program raskin di daerah penelitian diklarifikasi kembali kepada petugas

pembagian raskin di daerah penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa ternyata memang terdapat rumah tangga yang tidak seharusnya menerima Raskin lagi, namun masih terdaftar sebagai penerima Raskin sesuai data PPLS 2011. Hal ini terjadi karena masih belum dilakukannya pemutakhiran kembali mengenai daftar RTS-PM. Akibatnya, terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima tetapi tidak terdaftar pada Basis Data Terpadu. Hal ini mendorong petugas untuk melakukan sistem '*bagi rata*' karena banyak rumah tangga yang tidak terdaftar di daerah ini, ternyata layak untuk mendapatkan Raskin tersebut kecuali PNS (Pegawai Negeri Sipil). Realisasi rumah tangga yang menerima di daerah ini adalah sebanyak 334 rumah tangga, sedangkan yang terdaftar sebagai penerima Raskin adalah 225 rumah tangga. Walaupun terdapat sistem bagi rata di daerah ini, semua Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar tetap memperoleh akses untuk mendapatkan Raskin tersebut. Tindakan yang diambil oleh petugas pembagian Raskin di daerah ini juga dilatarbelakangi alasan untuk menghindari kecemburuan sosial dan keributan antar warga.

2. Ketepatan jumlah

Di dalam Pedum Raskin 2013 dinyatakan bahwa tepat jumlah adalah jumlah Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/RTS/bulan (Menko Kesra, 2013:37). Sedangkan menurut data BPS, penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun atau setara dengan 9,5 kg/jiwa/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bantuan Raskin yang diberikan oleh Pemerintah kepada rumah tangga miskin dengan tujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan beras rumah tangga masih rendah, karena terdapat faktor jumlah anggota keluarga untuk menentukan jumlah konsumsi beras di setiap rumah tangga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga suatu rumah tangga maka akan semakin banyak jumlah beras yang dikonsumsi.

Pada penelitian ini, ketepatan jumlah diartikan apabila setiap rumah tangga menerima ≥ 15 kg/bulan. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah konsumsi beras rumah tangga setiap bulannya, maka dengan mendapatkan beras ≥ 15 kg dianggap

tepat karena mendekati jumlah rata-rata konsumsi beras rumah tangga setiap bulannya di daerah penelitian yaitu 42 kg/bulan dengan jumlah anggota keluarga rata-rata adalah 5 (lima) orang dan setiap orang mengkonsumsi beras rata-rata 8,8 kg/bulan (Lampiran 11).

Hasil analisis data diperoleh bahwa jumlah Raskin yang diterima oleh rumah tangga tidak sama dengan jumlah yang telah ditetapkan. Rata-rata setiap rumah tangga di daerah penelitian menerima Raskin sebanyak 11,56 kg/RTS/bulan pada tahun 2013. Kondisi ini terjadi karena Raskin tidak hanya dibagikan kepada RTS-PM yang terdaftar, tetapi juga dibagikan kepada rumah tangga lainnya yang tidak terdaftar. Sehingga terjadinya pengurangan jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rata-rata beras yang diterima oleh rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi beras rumah tangga masih tergolong rendah yaitu sekitar 27 % dari jumlah konsumsi rata-rata rumah tangga yaitu sebanyak 42 kg/bulan.

Tabel 18. Ketepatan Jumlah Raskin yang Diterima Rumah Tangga tahun 2013.

No	Keterangan	Jumlah RT	Persentase (%)
1.	Tepat Jumlah (≥ 15 kg/RTS/bulan)	14	20
2.	Tidak Tepat Jumlah (< 15 kg/RTS/bulan)	55	80
Jumlah		69	100

Dari Tabel 18, dapat dilihat bahwa tidak semua rumah tangga yang menerima Raskin termasuk pada kategori tepat jumlah yaitu menerima beras sebanyak ≥ 15 kg/RTS/bulan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang menerima Raskin ≥ 15 kg/bulan adalah sebanyak 14 rumah tangga (20%), sedangkan jumlah rumah tangga yang menerima Raskin < 15 kg/bulan ada sebanyak 55 rumah tangga (80%). Persentase rumah tangga yang tidak tepat jumlah lebih besar dibandingkan dengan persentase rumah tangga yang tepat jumlah, artinya pelaksanaan program Raskin di daerah ini belum bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi beras rumah tangga, karena rendahnya persentase kontribusi Raskin tersebut.

Ketidaktepatan jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM di daerah penelitian ini, tidak hanya didorong oleh karena diberlakukannya sistem bagi rata

atau dibagikannya Raskin kepada rumah tangga lainnya yang tidak terdaftar. Tetapi, keadaan ekonomi masyarakat di daerah ini yang tergolong rendah juga ikut melatarbelakangi keadaan tersebut sehingga terdapat sebagian rumah tangga tidak bisa menebus Raskin sesuai jumlah dan harga yang berlaku di daerah penelitian atau bahkan tidak mengambil Raskin tersebut pada waktu penyaluran.

Hasil analisis mengenai ketepatan jumlah Raskin tersebut diklarifikasi kembali kepada petugas pembagian Raskin di daerah penelitian. Dari keterangan petugas pembagian diperoleh informasi bahwa memang jumlah beras yang dibagikan kepada rumah tangga tidak sebanyak yang sudah ditetapkan yaitu 15 kg/RTS/bulan. Hal ini terjadi karena Raskin tidak hanya dibagikan kepada RTS-PM sehingga jumlah Raskin yang dibagikan kepada rumah tangga menjadi berkurang. Selain itu, ada beberapa rumah tangga dengan pertimbangan kondisi keluarga yang sangat miskin dan dirasa berhak mendapatkan Raskin lebih dari yang ditetapkan, serta di dorong dengan adanya rasa toleransi antar masyarakat yang bersedia mengurangi jatah mereka untuk rumah tangga yang sangat membutuhkan beras tersebut. Kondisi ini terjadi karena masih rendahnya jumlah beras yang disediakan dibandingkan dengan jumlah beras yang dibutuhkan dan masih adanya rumah tangga yang seharusnya tidak menerima Raskin tetapi masih terdaftar sebagai penerima Raskin tersebut.

3. Ketepatan harga

Pada tahun 2013, harga pembelian beras oleh Bulog adalah Rp. 7.751/kg dan disubsidi sebesar Rp. 6.151/kg sehingga harga jual Raskin yang ditetapkan adalah Rp. 1.600/kg, sebagaimana dinyatakan dalam Pedum Raskin 2013 (Menko Kesra, 2013:37). Ketentuan tepat harga tersebut juga dijadikan sebagai indikator ketepatan harga pada penelitian ini, yaitu program Raskin dikatakan tepat harga apabila rumah tangga menebus Raskin dengan harga Rp. 1.600/kg dan program Raskin dikatakan tidak tepat harga apabila rumah tangga menebus Raskin dengan harga > Rp. 1.600/kg.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, diperoleh bahwa rata-rata harga Raskin yang diterima dan dibayarkan oleh RTS-PM adalah sebesar Rp. 2.355/kg (Lampiran 11). Hal ini menunjukkan bahwa harga Raskin termasuk pada kategori

tidak tepat harga karena harga yang diterima lebih tinggi dibandingkan harga yang sudah ditetapkan dalam Pedum Raskin 2013, yaitu terjadi peningkatan harga sebesar 47 % dari harga seharusnya.

Tabel 19. Ketepatan Harga Raskin yang Diterima Rumah Tangga tahun 2013.

No	Keterangan	Jumlah RT	Persentase (%)
1.	Tepat Harga (Rp. 1.600/kg)	0	0
2.	Tidak Tepat Harga (> Rp. 1.600/kg)	69	100
Jumlah		69	100

Dari Tabel 19 dapat dilihat bahwa 69 rumah tangga (100%) yang dijadikan sampel, membayar Raskin dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena keadaan geografis daerah yang susah untuk diakses kendaraan umum, sehingga beras tidak langsung diserahkan oleh Bulog ke lokasi penyerahan atau Titik Distribusi (TD) yang telah disepakati. Bulog menyalurkan beras hanya sampai kantor camat, sehingga setiap nagari di kecamatan ini harus menjemput beras tersebut ke kantor camat. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya penambahan biaya operasional dalam penyaluran Raskin dari kecamatan ke Titik Bagi (TB), khususnya di Nagari Limau Gadang yang terdiri dari Kampung Limau-limau dan Kampung Ngalau gadang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Limau Gadang, diperoleh informasi bahwa biaya operasional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyaluran Raskin dari TD ke TB adalah Rp. 50/kg, karena biaya penyaluran dari Bulog ke TD ditanggung oleh Bulog. Dengan pengalokasian pagu raskin sebanyak 50.625 kg untuk Nagari Limau Gadang Pc. Taba pada tahun 2013, maka biaya operasional yang disediakan adalah sebesar Rp. 2.531.250 atau Rp. 210.937/bulan. Sedangkan, menurut keterangannya biaya operasional yang dikeluarkan setiap penyaluran raskin mencapai Rp. 650.000 untuk penyaluran ke Kampung Limau-limau dan Rp. 750.000 untuk penyaluran ke Kampung Ngalau Gadang dari kantor camat. Artinya, biaya yang dianggarkan pemerintah untuk penyaluran Raskin masih tergolong rendah apabila dilihat dari kebutuhan biaya operasional yang tergantung pada akses sarana dan prasarana transportasi. Untuk kondisi daerah penelitian yang sulit diakses kendaraan umum, anggaran diatas

masih tergolong rendah karena kekurangan dana lebih besar daripada dana yang disediakan.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah nagari untuk menaikkan harga Raskin guna menutupi kekurangan biaya penyaluran Raskin tersebut, walaupun dalam Pedum Raskin 2013 telah dijelaskan bahwa apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di titik distribusi (Menko Kesra, 2013:26).

4. Ketepatan waktu

Pelaksanaan program Raskin dikatakan tepat waktu apabila waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran (Menko Kesra, 2013:37). Pada tahun 2013, waktu penyaluran Raskin adalah sebanyak 15 kali. Untuk waktu dan tatacara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah tersebut. Pada penelitian ini, ketepatan waktu diartikan sebagai rumah tangga menerima Raskin ≥ 15 kali dalam tahun 2013 karena semakin banyak frekuensi rumah tangga menerima Raskin maka semakin banyak jumlah beras yang diterima, sehingga semakin mendekati rata-rata kebutuhan konsumsi beras rumah tangga. Secara teknis, pelaksanaan program raskin di daerah penelitian termasuk pada kategori tepat waktu yaitu telah menyalurkan Raskin sebanyak 15 kali. Penyaluran Raskin untuk yang ke-13, 14, dan 15 dilakukan pada bulan Juli, September dan Oktober. Namun, berdasarkan hasil analisis data mengenai ketepatan waktu penyaluran Raskin di tingkat rumah tangga dapat dilihat bahwa 48 rumah tangga (70%) termasuk pada kategori tepat waktu yaitu menerima Raskin ≥ 15 kali dalam tahun 2013, sedangkan 21 rumah tangga (30%) lainnya termasuk pada kategori tidak tepat waktu (Tabel 20).

Tabel 20. Ketepatan Waktu Penyaluran Raskin tahun 2013.

No	Keterangan	Jumlah Rumah Tangga	Persentase (%)
1.	Tepat Waktu	48	70
2.	Tidak Tepat Waktu	21	30
Jumlah		69	100

Berdasarkan Tabel 20 di atas, terlihat bahwa persentase rumah tangga yang menerima Raskin ≥ 15 kali pada tahun 2013 lebih besar dibandingkan rumah tangga yang menerima Raskin < 15 kali pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa program Raskin sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Ketidaktepatan waktu yang diterima oleh sebagian RTS disebabkan oleh: a) adanya RTS yang tidak menebus beberapa kali Raskin sehingga frekuensi waktu penerimaan Raskin menjadi berkurang, b) keterlambatan RTS dalam pengambilan Raskin sehingga sudah diberikan terlebih dahulu kepada rumah tangga lainnya, dan c) terjadinya penambahan frekuensi penerimaan raskin pada beberapa RTS.

5. Ketepatan kualitas

Tepat kualitas diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah yaitu beras yang dibagikan berkualitas medium dengan aturan kadar air tidak lebih dari 14 persen dan tidak boleh lebih dari 20 persen yang patah serta derajat kebersihan harus 90 persen, tidak apek dan tidak berbau, serta tidak berketu.

Kualitas beras yang diterima oleh RTS bervariasi, sebagian besar cukup baik namun terkadang buruk. Ditinjau dari kualitas Raskin, setiap rumah tangga mempunyai penilaian sendiri, meskipun demikian beras yang dibagikan tetap dikonsumsi oleh rumah tangga penerima raskin tersebut.

Tabel 21. Ketepatan Kualitas Raskin bagi Rumah Tangga tahun 2013.

No	Keterangan	Jumlah Rumah Tangga	Persentase (%)
1.	Tepat Kualitas	31	45
2.	Tidak Tepat Kualitas	38	55
Jumlah		69	100

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwa rumah tangga yang menerima Raskin pada kategori tepat dengan kualitas beras cukup bagus yaitu beras cukup bersih, tidak berketu dan tidak banyak yang patah adalah sebanyak 31 rumah tangga (45%), sedangkan rumah tangga yang mendapatkan beras pada kategori tidak tepat dengan kualitas yang kurang bagus yaitu berbau, berketu, kurang

bersih dan banyak beras yang patah adalah 38 rumah tangga (55%). Hal ini berarti pelaksanaan raskin di daerah ini masih termasuk pada kategori tidak tepat kualitas. Walaupun tidak semua yang menerima raskin dengan kualitas kurang bagus, tapi lebih dari 50% responden mendapatkan Raskin dengan kualitas kurang bagus.

Terkait tentang hal ini, di dalam Pedum Raskin 2013 telah dijelaskan mengenai ketentuan penyaluran Raskin yaitu sebelum Raskin disalurkan Perum Bulog melakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu dan kemudian Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum Bulog di titik distribusi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka pelaksana distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.

Hasil wawancara dengan petugas pembagian Raskin mengenai kualitas beras yang dibagikan di daerah ini menunjukkan bahwa kualitas beras memang masih tergolong kepada kurang bagus karena masih terdapat beberapa beras yang berkutu, berbau dan kurang bersih. Beras yang memiliki kualitas bagus hanya terdapat pada beberapa karung saja, sehingga hanya beberapa rumah tangga yang mendapatkan beras dengan kualitas tersebut. Ketidaktepatan ini sudah disampaikan kepada Perum Bulog, namun kualitas beras yang diterima masih tetap sama yaitu ada beberapa karung beras dengan kualitas bagus dan ada juga beras dengan kualitas kurang bagus. Dengan demikian, untuk menghindari masalah penyaluran Raskin oleh Perum Bulog di daerah penelitian, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi lebih memilih untuk menerima Raskin dengan kualitas beras yang diberikan oleh Bulog dan tidak mempermasalahkannya karena hal ini akan berdampak pada terhambatnya penyaluran Raskin kepada RTS-PM.

6. Ketepatan administrasi

Ketepatan administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap (Menko Kesra, 2013:37). Namun, pada

penelitian ini, tepat administrasi diartikan sebagai ketepatan pembayaran Raskin oleh RTS setelah beras dibagikan. Sesuai dengan ketentuan mengenai pembayaran HTR yang terdapat di dalam Pedum Raskin 2013 bahwa pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 69 rumah tangga (100%) yang dijadikan sampel pada penelitian ini telah melakukan pembayaran Raskin secara tunai setelah mereka menerima beras tersebut, artinya pelaksanaan program Raskin di daerah ini termasuk pada tepat administrasi (Tabel 22). Menurut keterangan RTS, beras tidak akan dibagikan jika tidak dibayar lunas dan jika RTS tidak bisa menebus beras tersebut maka jatahnya akan diberikan kepada rumah tangga lainnya.

Tabel 22. Ketepatan Administrasi dalam Pembayaran Raskin oleh Rumah Tangga tahun 2013.

No	Keterangan	Jumlah Rumah Tangga	Persentase (%)
1.	Tepat Administrasi	69	100
2.	Tidak Tepat Administrasi	0	0
Jumlah		69	100

Ketepatan RTS dalam membayar Raskin juga didukung oleh ketepatan pembayaran oleh pelaksana distribusi di daerah penelitian kepada pihak kecamatan, yang mana pembayarannya akan diteruskan kepada Perum Bulog baik langsung maupun melalui rekening Perum Bulog. Hal inilah yang menyebabkan tidak terhambatnya penyaluran Raskin di daerah ini setiap bulannya. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas pembagian Raskin di daerah penelitian, bahwa memang semua rumah tangga yang menerima Raskin membayar dengan lunas dan langsung setelah beras tersebut dibagikan dan diterima oleh rumah tangga tersebut. Begitu juga dengan ketepatan pembayaran pihak nagari kepada pihak kecamatan. Menurut Wali Nagari, masalah ketepatan pembayaran ke kecamatan selalu dilakukan atau dibayarkan secara lunas dalam waktu seminggu setelah beras dibagikan. Selama tahun 2013, Nagari Limau Gadang Pc. Taba tidak pernah melakukan penunggakan pembayaran Raskin ke kecamatan. Hal ini dikarenakan pembayaran yang terlambat atau adanya penunggakan akan menghambat penyaluran Raskin pada bulan selanjutnya.

7. Analisa tingkat keberhasilan program raskin bagi RTS

Keberhasilan program Raskin adalah tercapainya target 6T yang telah ditetapkan dalam Pedum Raskin tahun 2013, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. Mengacu pada hasil analisis data ketepatan yang dicapai setiap rumah tangga sampel di atas, maka diperoleh gambaran distribusi frekuensi mengenai tingkat keberhasilan program Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di daerah penelitian.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program Raskin bagi RTS paling banyak berada pada kategori “Cukup berhasil” yaitu sebanyak 33 rumah tangga atau 48% dari rumah tangga yang dijadikan sampel (Tabel 23).

Tabel 23. Tingkat Keberhasilan Program Raskin bagi Rumah Tangga Sampel tahun 2013.

No	Kategori	Persentase Kategori (%)	Frekuensi	
			F	%
1.	Kurang Berhasil	< 40 %	31	45
2.	Cukup Berhasil	40 – 60 %	33	48
3.	Berhasil	61 – 80 %	4	6
4.	Sangat Berhasil	> 80 %	1	1
Jumlah			69	100

Hasil analisis di atas, sejalan dengan nilai rata-rata persentase keberhasilan program Raskin yang diperoleh pada daerah penelitian, yaitu sebesar 42,51 % yang termasuk pada kategori “cukup berhasil”. Analisa lebih lanjut mengenai persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan program Raskin di daerah ini adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Keberhasilan Program} &= \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\% \\
 &= 176 / 414 \times 100\% \\
 &= \mathbf{42,51 \% \text{ (Cukup Berhasil)}}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Realisasi = Total jumlah rumah tangga yang mencapai ketepatan

Target = Total jumlah rumah tangga yang mencapai ketepatan seharusnya (69 rumah tangga x 6 = 414)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian sudah cukup berhasil, terutama pada indikator tepat waktu

dan tepat administrasi. Namun, masih terdapat ketidaktepatan pada beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian yaitu terutama terkait ketepatan harga yang mana semua rumah tangga yang dijadikan sampel (69 RTS) menerima dan membayarkan harga Raskin lebih tinggi dari yang ditetapkan. Selanjutnya ketidaktepatan sasaran dan jumlah beras yang diterima juga ikut mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Banyaknya realisasi rumah tangga yang menerima Raskin dibandingkan rumah tangga yang terdaftar mengakibatkan kurangnya jumlah Raskin yang diterima RTS, sedangkan rata-rata kebutuhan konsumsi beras rumah tangga cukup tinggi. Diantara RTS-PM yang terdaftar sebagai penerima Raskin masih terdapat rumah tangga yang seharusnya tidak menerima Raskin, maka dari itu perlu dilakukannya kembali pemutakhiran data RTS-PM agar program Raskin lebih tepat sasaran. Kualitas beras yang kurang bagus turut menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program di daerah ini.

D. Analisa Tingkat Manfaat Program yang Diperoleh oleh Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Manfaat program Raskin adalah sesuai dengan tujuan dari program raskin tersebut yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi konsumsi pangan pokok (beras). Menurut teori ekonomi, hal ini disebut sebagai “*surplus konsumen*” (Boediono, 1999:29), yaitu perbedaan antara jumlah yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah barang dengan jumlah sebenarnya yang dibayar konsumen.

Tingkat manfaat yang diterima oleh setiap rumah tangga berbeda-beda, hal ini tergantung pada 5 (lima) indikator yaitu jumlah Raskin yang diterima RTS, harga Raskin yang diterima RTS, harga beras yang berlaku di pasar, jumlah anggota keluarga, dan jumlah konsumsi beras per kapita per bulan pada tingkat rumah tangga.

1. Jumlah konsumsi beras dan besar pengeluaran per kapita per bulan di tingkat rumah tangga sebelum menerima Raskin

Jumlah konsumsi beras per-kapita/bulan di setiap rumah tangga berbeda-beda karena ada 2 (dua) hal yang mempengaruhi besar atau kecilnya konsumsi

beras tersebut, yaitu rata-rata jumlah konsumsi beras rumah tangga dan jumlah anggota keluarga pada rumah tangga tersebut.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata jumlah konsumsi beras rumah tangga di daerah penelitian setiap bulannya adalah 42 kg, dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 5 (lima) orang. Dengan demikian diperoleh bahwa rata-rata jumlah konsumsi beras per-kapita/bulan sebanyak 8,8 kg. Nilai rata-rata ini hampir mendekati nilai rata-rata konsumsi beras per kapita per bulan menurut BPS yaitu 9,5 kg/kapita/bulan yang tergolong tinggi. Berdasarkan nilai rata-rata konsumsi beras per kapita/bulan tersebut, maka pada penelitian ini tingkat konsumsi beras per kapita/bulan dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu: a) tingkat konsumsi bernilai kurang dari 3,75 kg/kapita/bulan berarti kurang, b) tingkat konsumsi bernilai 3,75 sampai dengan 7,5 kg/kapita/bulan berarti cukup, c) tingkat konsumsi bernilai 7,6 sampai dengan 11,35 kg/kapita/bulan berarti tinggi, dan d) tingkat konsumsi bernilai diatas 11,35 kg/kapita/bulan berarti sangat tinggi.

Tabel 24. Jumlah Konsumsi Beras Per Kapita/bulan.

No	Kategori	Konsumsi Beras/kapita/bulan (Kg)	Jumlah RT	Persentase (%)
1.	Kurang	< 3,75	0	0
2.	Cukup	3,75 – 7,5	8	12
3.	Tinggi	7,6 – 11,35	58	84
4.	Sangat Tinggi	> 11,35	3	4
Total			69	100

Berdasarkan Tabel 24, dapat dilihat tingkat konsumsi beras per-kapita/bulan berada pada kategori “tinggi” yaitu sebanyak 58 rumah tangga (84%), yang mana setiap anggota keluarganya rata-rata mengkonsumsi beras sekitar 7,6 – 11,35 kg/kapita/bulan dan hanya 3 rumah tangga (4%) yang berada pada tingkat konsumsi “sangat tinggi” dengan setiap anggota keluarganya rata-rata mengkonsumsi beras lebih dari 11,35 kg/kapita/bulan. Hasil analisis data tersebut sejalan dengan rata-rata jumlah konsumsi beras per-kapita/bulan di daerah penelitian yaitu 8,8 kg yang juga berada pada tingkat konsumsi dengan kategori “tinggi” (Lampiran 11).

Tingkat konsumsi beras per kapita per bulan pada suatu rumah tangga mempengaruhi jumlah pengeluaran per kapita per bulan dalam mengkonsumsi beras apabila tidak mendapatkan program Raskin. Besar pengeluaran ini tergantung pada harga beras yang berlaku di pasar dan jumlah konsumsi beras per-kapita/bulan. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita di daerah penelitian adalah sebesar Rp. 65.425/bulan (Lampiran 11) dan termasuk pada tingkat pengeluaran dengan kategori tinggi karena nilai rata-rata tersebut berada di atas nilai rata-rata pengeluaran untuk konsumsi beras per kapita per bulan menurut BPS dalam Pusdatin (2014:12) yaitu Rp. 682.029/kapita/tahun atau Rp. 56.835/kapita/bulan.

Berdasarkan nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tersebut, maka pada penelitian ini tingkat pengeluaran per kapita per bulan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu: a) tingkat pengeluaran bernilai kurang dari Rp. 23.400/kapita/bulan berarti rendah, b) tingkat pengeluaran bernilai Rp. 23.400 sampai dengan Rp. 46.800/kapita/bulan berarti cukup tinggi, c) tingkat pengeluaran bernilai Rp. 46.900 sampai dengan Rp. 70.300/kapita/bulan berarti tinggi, dan d) tingkat pengeluaran bernilai besar diatas Rp. 70.300/kapita/bulan berarti sangat tinggi.

Tabel 25. Jumlah Pengeluaran Per Kapita/bulan untuk Konsumsi Beras Sebelum Menerima Raskin.

No	Kategori	Pengeluaran/kapita/bulan (Rp)	Jumlah RT	Persentase (%)
1.	Rendah	< Rp. 23.400	0	0
2.	Cukup Tinggi	Rp. 23.400 – Rp. 46.800	4	6
3.	Tinggi	Rp. 46.900 – Rp. 70.300	42	61
4.	Sangat Tinggi	> Rp. 70.300	23	33
Total			69	100

Pada Tabel 25, dapat dilihat bahwa rumah tangga paling banyak memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada pada kategori “tinggi” yaitu sebanyak 42 rumah tangga (61%), dengan besar pengeluaran sekitar Rp. 46.900 – Rp. 70.300/kapita/bulan. Sedangkan rumah tangga paling sedikit memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada pada kategori “cukup tinggi” yaitu sebanyak 4 rumah tangga (6%), dengan besar pengeluaran sekitar Rp. 23.400 – Rp. 46.800/kapita/bulan. Kondisi ini terjadi karena tingginya konsumsi beras per

kapita per bulan di tingkat rumah tangga, sehingga pengeluaran per kapita per bulan juga tergolong tinggi. Hasil analisis data tersebut sejalan dengan nilai rata-rata konsumsi beras yaitu 8,8 kg/kapita/bulan dan nilai rata-rata pengeluaran per kapita/bulan yaitu Rp. 65.425/kapita/bulan.

2. Pengurangan beban pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga setelah menerima raskin

Sesuai dengan tujuan dari program Raskin, yaitu dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi konsumsi pangan pokok (beras). Hal ini merupakan manfaat yang dapat diperoleh oleh RTS-PM melalui bantuan beras dengan harga dibawah harga pasar, sehingga pengeluaran rumah tangga dapat berkurang.

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengurangan beban pengeluaran rumah tangga setelah menerima Raskin adalah Rp. 57.810/RTS/bulan atau setara dengan Rp. 13.933/kapita/bulan. Berdasarkan nilai rata-rata pengurangan beban pengeluaran per kapita per bulan tersebut, maka pada penelitian ini tingkat pengurangan beban pengeluaran per kapita per bulan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu: a) tingkat pengurangan beban pengeluaran bernilai kurang dari Rp. 7.300/kapita/bulan berarti rendah, b) tingkat pengurangan beban pengeluaran bernilai Rp. 7.300 sampai dengan Rp. 14.600/kapita/bulan berarti cukup tinggi, c) tingkat pengurangan beban pengeluaran bernilai Rp. 14.700 sampai dengan Rp. 22.000/kapita/bulan berarti tinggi, dan d) tingkat pengurangan beban pengeluaran bernilai diatas Rp. 22.000/kapita/bulan berarti sangat tinggi.

Tabel 26. Jumlah Pengurangan Beban Pengeluaran Per Kapita/bulan Setelah Menerima Raskin.

No	Kategori	Pengurangan Beban Pengeluaran/kapita/bulan	Jumlah Rumah Tangga	Persentase (%)
1.	Rendah	< Rp. 7.300	6	9
2.	Cukup Tinggi	Rp. 7.300 – Rp. 14.600	37	54
3.	Tinggi	Rp. 14.700 – Rp. 22.000	19	27
4.	Sangat Tinggi	> Rp. 22.000	7	10
Total			69	100

Dari Tabel 26 di atas, dapat disimpulkan bahwa besar pengurangan beban pengeluaran/kapita/bulan di tingkat rumah tangga berada pada kategori “cukup tinggi” yaitu sebanyak 37 rumah tangga (54%), artinya rata-rata besar pengurangan beban pengeluaran per-kapita adalah sekitar Rp. 7.300 – Rp. 14.600/bulan. Sedangkan jumlah rumah tangga yang paling sedikit berada pada tingkat pengurangan beban pengeluaran per kapita dengan kategori “rendah”, yaitu sebanyak 6 rumah tangga (9%), artinya rata-rata besar pengurangan beban pengeluaran per kapita adalah kecil dari Rp. 7.300/bulan. Hasil analisis data tersebut sejalan dengan nilai rata-rata pengurangan beban pengeluaran per kapita di daerah penelitian, yaitu Rp. 13.993/kapita/bulan.

3. Analisa tingkat manfaat pogram raskin bagi RTS-PM

Manfaat program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan rumah tangga dalam bentuk beras (Menko Kesra, 2013:11). Mengacu pada hasil analisis data mengenai tingkat konsumsi, tingkat pengeluaran, dan tingkat pengurangan beban pengeluaran yang dicapai per-kapita/bulan di setiap rumah tangga di atas, maka diperoleh gambaran distribusi frekuensi mengenai tingkat manfaat program Raskin di daerah penelitian.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang berada pada tingkat manfaat program “kurang bermanfaat” adalah paling banyak yaitu 63 rumah tangga (91%). Sedangkan jumlah rumah tangga yang berada pada tingkat manfaat program yang paling sedikit berada pada kategori “cukup bermanfaat” yaitu sebanyak 6 rumah tangga (9%) dari RTS yang dijadikan sampel (Tabel 27)

Tabel 27. Tingkat Manfaat Program Raskin Per Kapita/bulan di Tingkat Rumah Tangga pada tahun 2013.

No	Kategori	Persentase Kategori (%)	Frekuensi	
			F	%
1.	Kurang Bermanfaat	< 40 %	63	91
2.	Cukup Bermanfaat	40 – 60 %	6	9
3.	Bermanfaat	61 – 80 %	0	0
4.	Sangat Bermanfaat	> 80 %	0	0
Jumlah			69	100

Hasil analisis di atas, sejalan dengan nilai rata-rata persentase tingkat manfaat program Raskin yang diperoleh pada daerah penelitian, yaitu sebesar 21,39% yang termasuk pada kategori “kurang bermanfaat”. Analisa lebih lanjut mengenai persentase tingkat manfaat program Raskin di daerah ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{Manfaat Program} &= \frac{\text{Rata-rata pengurangan beban pengeluaran/kapita} \times 100\%}{\text{Rata-rata pengeluaran/kapita sebelum menerima raskin}} \\ &= \text{Rp. } 13.933 / \text{Rp. } 65.425 \times 100\% \\ &= 21,39 \% \text{ (**Kurang Bermanfaat**)} \end{aligned}$$

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian sudah memberikan manfaat bagi RTS-PM, namun tingkat manfaat yang dicapai masih termasuk pada kategori “kurang bermanfaat”. Kondisi ini disebabkan karena tingginya rata-rata pengeluaran/kapita/bulan dalam mengkonsumsi beras sebelum menerima program Raskin yaitu Rp. 65.425/bulan, dibandingkan dengan rata-rata pengurangan beban pengeluaran/kapita/bulan dengan adanya program raskin tersebut yaitu sebesar Rp. 13.933/bulan atau sekitar 21% dari total pengeluaran sebelum adanya program Raskin. Selain itu, kurang bermanfaatnya program Raskin disebabkan oleh tingginya jumlah konsumsi beras per-kapita/bulan yaitu 8,8 kg dengan kebutuhan konsumsi beras setiap rumah tangga/bulan adalah 42 kg, sedangkan bantuan Raskin yang diperoleh adalah sebesar 11,56 kg/RTS/bulan. Namun demikian, Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap RTS-PM dalam memenuhi jumlah konsumsi beras rumah tangga di daerah penelitian.

E. Analisa Hubungan Antara Tingkat Keberhasilan Program dengan Tingkat Manfaat yang Diperoleh oleh Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedua variabel yaitu tingkat keberhasilan dan tingkat manfaat, maka pada bagian ini dilakukan analisis hubungan antara kedua variabel penelitian tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus statistik sederhana yaitu analisis *Chi-square* (Kai-kwadrat) dan analisis koefisien kontingensi, sebagai berikut:

1. Analisis *chi-square* (kai-kwadrat)

Analisis *chi-square* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel tingkat keberhasilan program Raskin (X) dengan variabel tingkat manfaat program Raskin (Y) di daerah penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan pada analisis ini adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis penelitian

H_0 : Tidak ada hubungan antara keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh RTS

H_1 : Ada hubungan antara keberhasilan program dengan tingkat manfaat yang diperoleh RTS

b. Level of significance : $\chi^2 = 21,666$ (Tabel χ^2)

c. Kriteria pengujian : H_0 diterima apabila $\chi^2 \leq 21,666$

H_0 ditolak apabila $\chi^2 > 21,666$

d. Perhitungan nilai e_{ij} dan χ^2 (Tabel 28)

Tabel 28. Perhitungan nilai e_{ij} dan χ^2

e_{ij}	$(n_i)(n_j) / n$	Nilai e_{ij}	$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$	Nilai χ^2
e_{14}	$(1 \times 63) / 69$	0,91	$(1 - 0,91)^2 / 0,91$	0,008
e_{24}	$(4 \times 63) / 69$	3,65	$(4 - 3,65)^2 / 3,65$	0,033
e_{33}	$(33 \times 6) / 69$	2,87	$(5 - 2,87)^2 / 2,87$	1,58
e_{34}	$(33 \times 63) / 69$	30,13	$(28 - 30,13)^2 / 30,13$	0,15
e_{43}	$(31 \times 6) / 69$	2,69	$(1 - 2,69)^2 / 2,69$	1,06
e_{44}	$(31 \times 63) / 69$	28,30	$(30 - 28,30)^2 / 28,30$	0,10
Total χ^2				2,931

e. Kesimpulan :

χ^2 (hitung) < χ^2 (tabel) atau $2,931 < 21,666$, maka terima H_0 artinya tidak terdapat hubungan antara variabel keberhasilan (X) dengan variabel manfaat program raskin (Y).

Berdasarkan perhitungan *chi-square* di atas maka diperoleh gambaran mengenai tabulasi silang antara variabel X dengan variabel Y, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 29 berikut ini:

Tabel 29. Hubungan Keberhasilan Program Raskin dengan Manfaat yang Diperoleh oleh RTS.

Kategori Variabel Keberhasilan Program Raskin (X)		Manfaat Program Raskin (Y)				Jumlah
		Sangat Bermanfaat	Bermanfaat	Cukup Bermanfaat	Kurang Bermanfaat	
Sangat Berhasil	f_0 %	-	-	-	1 (0,91) 100,0	1 100
Berhasil	f_0 %	-	-	-	4 (3,65) 100,0	4 100,0
Cukup Berhasil	f_0 %	-	-	5 (2,87) 15,0	28 (30,13) 85,0	33 100,0
Kurang Berhasil	f_0 %	-	-	1 (2,69) 3,0	30 (28,30) 97,0	31 100,0
Jumlah		-	-	6	63	69

Distribusi data pada Tabel 29, menunjukkan bahwa rumah tangga yang berada pada setiap tingkat keberhasilan adalah rumah tangga yang memperoleh tingkat manfaat pada kategori “kurang bermanfaat”. Hal ini berarti bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan program Raskin, cenderung tidak mempengaruhi tingkat manfaat yang diterima oleh RTS-PM. Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, dapat dilihat bahwa paling banyak RTS berada pada tingkat keberhasilan kategori “kurang berhasil” dan memperoleh tingkat manfaat pada kategori “kurang bermanfaat” yaitu sebanyak 30 rumah tangga (43%). Sedangkan RTS yang paling sedikit berada pada tingkat keberhasilan kategori “kurang berhasil” dan memperoleh tingkat manfaat pada kategori “cukup bermanfaat” yaitu hanya 1 rumah tangga (1%), serta RTS yang berada pada tingkat keberhasilan kategori “sangat berhasil” dan memperoleh tingkat manfaat pada kategori “kurang bermanfaat” yaitu hanya 1 rumah tangga (1%).

2. Analisis koefisien kontingensi

Berdasarkan hasil nilai *chi-square* yang diperoleh, maka selanjutnya dihitung nilai koefisien kontingensi. Analisis koefisien kontingensi digunakan untuk mengetahui atau mengukur tingkat keeratan (derajat) hubungan antara variabel tingkat keberhasilan dengan variabel tingkat manfaat program Raskin yang diuji. Berikut adalah perhitungan untuk mengetahui nilai koefisien kontingensi, yaitu:

$$C = \sqrt{\chi^2 / \chi^2 + n}$$

$$C = \sqrt{(2,931) / (2,931) + 69}$$

$$C = 1,712 / 71,931$$

$$C = 0,0238 \text{ (*Kekuatan hubungan antara kedua variabel sangat rendah atau lemah sekali*)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Kontingensi (KK) di atas, diperoleh bahwa nilai KK adalah 0,0238. Nilai ini menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara kedua variabel sangat rendah atau lemah sekali. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai *chi-square* yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara kedua variabel penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang **“Evaluasi Keberhasilan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Program Raskin) dan Manfaatnya Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan”** yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian sudah cukup berhasil, terutama pada indikator tepat waktu dan tepat administrasi. Namun, masih terdapat ketidaktepatan pada beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian yaitu terutama terkait ketepatan harga yang mana semua rumah tangga yang dijadikan sampel (69 RTS) menerima dan membayarkan harga Raskin lebih tinggi dari yang ditetapkan. Selanjutnya ketidaktepatan sasaran dan jumlah beras yang diterima juga ikut mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Banyaknya realisasi rumah tangga yang menerima Raskin dibandingkan rumah tangga yang terdaftar mengakibatkan kurangnya jumlah Raskin yang diterima RTS, sedangkan rata-rata kebutuhan konsumsi beras rumah tangga cukup tinggi. Selain itu, kualitas beras yang kurang bagus juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program di daerah ini.
2. Pelaksanaan program Raskin di daerah penelitian sudah memberikan manfaat bagi RTS-PM, namun tingkat manfaat yang dicapai masih termasuk pada kategori “kurang bermanfaat”. Kondisi ini disebabkan karena tingginya rata-rata pengeluaran/kapita/bulan dalam mengkonsumsi beras sebelum menerima program Raskin yaitu Rp. 65.425/bulan, dibandingkan dengan rata-rata pengurangan beban pengeluaran/kapita/bulan dengan adanya program raskin tersebut yaitu sebesar Rp. 13.933/bulan atau sekitar 21% dari total pengeluaran sebelum adanya program Raskin. Selain itu, kurang bermanfaatnya program Raskin disebabkan oleh tingginya jumlah konsumsi beras per-kapita/bulan yaitu 8,8 kg dengan kebutuhan konsumsi beras setiap

rumah tangga/bulan adalah 42 kg, sedangkan bantuan Raskin yang diperoleh adalah sebesar 11,56 kg/RTS/bulan. Namun demikian, Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap RTS-PM dalam memenuhi jumlah konsumsi beras rumah tangga di daerah penelitian.

3. Hasil analisis hubungan (*chi-square* dan koefisien kontingensi) antara variabel tingkat keberhasilan program dengan variabel tingkat manfaat program Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di daerah penelitian menunjukkan bahwa antara kedua variabel penelitian tersebut tidak terdapat hubungan yang signifikan dan kekuatan hubungan antara kedua variabel sangat rendah atau lemah sekali. Hal ini terjadi karena tingkat keberhasilan pelaksanaan program Raskin, cenderung tidak mempengaruhi tingkat manfaat yang diterima oleh RTS-PM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait tingkat keberhasilan dan manfaat program Raskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, terdapat beberapa saran yang bisa diberikan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat program Raskin yaitu:

1. Agar program Raskin menjadi tepat sasaran, maka perlu dilakukan kembali pemutakhiran data RTS-PM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS dalam menentukan Rumah Tangga Sasaran program Raskin tersebut, yang disertai dengan kesepakatan masyarakat setempat.
2. Program Raskin adalah program yang bagus, tapi jumlah beras yang diberikan masih kurang dari kebutuhan rata-rata. Sebaiknya jumlah tersebut ditambah lagi, setidaknya mendekati kebutuhan rata-rata rumah tangga.
3. Upaya pemerintah dalam mensubsidi beras untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) sudah bagus dengan tujuan agar RTM memiliki akses terhadap pangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan mengenai ketepatan harga. Disarankan kepada petugas pelaksana penyaluran untuk tidak menaikkan harga Raskin, karena kekurangan biaya operasional dapat ditutupi dengan menambah anggaran APBD sesuai dengan keadaan geografis suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arnaya, P.Y., dan Made, S.U. 2012. *Efektivitas Kegiatan Simpan Pinjam Khusus bagi Kaum Perempuan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Denpasar Timur*. Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana. 13 hal.
- Antara Sumbar. 05 Maret 2013. *Keluarga Miskin Pesisir Selatan Belum Terima Raskin*. <http://www.antarasumbar.com> [22 Maret 2014].
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). 2011. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). 2013. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Agustus 2013*. Jakarta. 185 hal. <http://www.bps.go.id> [1 September 2013].
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). 2014. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Edisi 44, Januari. Jakarta. 161 hal. <http://www.bps.go.id> [11 Januari 2014].
- Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan (BPS). 2013. *Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013 Kabupaten Pesisir Selatan*. 19 hal. <http://pesselkab.bps.go.id> [04 Maret 2014].
- Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan (BPS). 2014. *Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam Angka 2014*. 137 hal.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS). 2013. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. 32 hal. <http://st2013.bps.go.id> [02 Juli 2014].
- Boediono. 1999. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1, Edisi 2*. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bungkaes, H.R., dkk., 2013. *Hubungan efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal "ACTA DIURNA", Edisi April 2013. 23 hal.
- Cahyat, Ade. 2004. *Bagaimana Kemiskinan Diukur: Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia*. CIFOR (Center for International Forestry Research). 8 hal.
- Dewi, Ida A.C., dkk. 2013. *Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar*. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana (Unud), Bali. 15 hal.
- Djarwanto dan Subagyo, Pangestu. 1993. *Statistik Induktif*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasan, Iqbal. 2010. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Haughton, J., dan Shahidur, R.K. 2012. *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. World Bank, penerjemah. Jakarta: Salemba Empat. Terjemahan dari: *Handbook on Poverty and Inequality*. 452 hal.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Jakarta. 5 hal.
- Kasim, Muslim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya (Studi Kasus: Padang Pariaman)*. Jakarta: Indomedia Global. 395 hal.
- Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). 2013. *Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin)*. Jakarta. 75 hal.
- Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/149/Kpts/BPT-PS/2013 tentang Penetapan Perincian Pagu Beras untuk Keluarga Miskin Per Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013. 8 hal.
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521 – 25 – 2013 tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (Raskin) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013. 4 hal.
- Mardikanto, Totok. 2010. *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat: Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi, dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan 1. Surakarta: Fakultas Pertanian UNS.
- Mardikanto, T., dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 352 hal.
- Maryana, Nina Rt. 2011. *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2010*. [Skripsi]. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 135 hal.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013*. Jakarta. 2 hal. <http://www.kemenkeu.go.id> [10 Maret 2014].
- Munandar, Aris. 2008. *Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* Vol.4: 151-162.
- Narbuko, Cholid., dan Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 216 hal.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 542 hal.
- Padang Ekspres. 15 Mei 2013. *Distribusi Raskin Tersendat*. <http://www.padangekspres.co.id> [22 Maret 2014].
- Padang Ekspres. 06 Juni 2013. *Warga Keluhkan Distribusi Raskin*. <http://www.padangekspres.co.id> [22 Maret 2014].

- Panjaya, Yossy Herma. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus: Di Kelurahan Pedulungan Kidul)*. [Skripsi]. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. 56 hal.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013. 26 hal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Jakarta. 15 hal.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian [PUSDATIN]. 2014. *Buletin Konsumsi Pangan*. Volume 5 No. 1, Tahun 2014. 69 hal. <http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id> [19 November 2014].
- Ranah Berita. 19 Januari 2014. *Tiga Daerah di Sumbar Menunggak Hasil Penjualan Raskin*. <http://www.ranahberita.com> [22 Maret 2014].
- Sangadji, E.M., dan Sopiya. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Septian, M, Dian., dkk. 2013. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin (RASKIN) di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*. Agrisepe Vol. 14 No. 1: 70-79.
- Setiadi, E.M., dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: Kencana. 976 hal.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suntoro, Eddy. 2003. *Delapan Kesalahan dalam Penyaluran Raskin*. Badan Bimas Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian. 3 hal. <http://www.unisosdem.org> [1 Maret 2014].
- Tabor, Steven R., dan Husein, S. 2005. *Raskin: A Macro-Program Assesment*. 14 hal.
- Tayibnapi, F.Y. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 238 hal.
- Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2009. *Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/> [23 Maret 2013].
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Proses*. Jakarta: Rajawali Pers. 476 hal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Pagu Beras bagi Keluarga Miskin (Raskin) per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013.

Kabupaten/Kota	Sasaran Raskin (RTS)	Pagu Raskin (Kg)
Wil. Kerja Divre Padang	90.183	20.291175
Kota Padang	30.474	6.856.650
Kab. Padang Pariaman	21.794	4.903.650
Kota Pariaman	3.314	745.650
Kab. Pesisir Selatan	24.298	5.467.050
Kab. Kep. Mentawai	10.303	2.318.175
Wil. Kerja Sub Divre Bukittinggi	109.412	24.617.700
Kab. Pasaman	20.193	4.543.425
Kab. Pasaman Barat	26.652	5.996.700
Kab. Agam	26.235	5.902.875
Kab. 50 Kota	24.946	5.612.850
Kota Bukittinggi	2.644	594.900
Kota Payakumbuh	6.383	1.436.175
Kota Padang Panjang	2.359	530.775
Wil. Kerja Sub Divre Solok	75.836	17.063.100
Kab. Sijunjung	11.999	2.699.775
Kab. Dhamasraya	9.566	2.152.350
Kab. Solok	22.828	5.136.300
Kab. Solok Selatan	9.188	2.067.300
Kota Sawahlunto	1.114	250.650
Kab. Tanah Datar	18.634	4.192.650
Kota Solok	2.507	564.075
Jumlah Sumbar	275.431	61.971.975

Sumber: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat, 2013.

Lampiran 2. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013.

No	Kabupaten/Kota	2013
1.	Kepulauan Mentawai	15.256
2.	Pesisir Selatan	71.563
3.	Solok	63.106
4.	Sijunjung	36.373
5.	Tanah Datar	60.182
6.	Padang Pariaman	55.428
7.	Agam	65.051
8.	Lima Puluh Kota	69.793
9.	Pasaman	46.556
10.	Solok Selatan	24.440
11.	Dharmasraya	31.703
12.	Pasaman Barat	58.376
71.	Padang	19.576
72.	Solok	2.590
73.	Sawah Lunto	6.558
74.	Padang Panjang	1.775
75.	Bukittinggi	1.850
76.	Payakumbuh	9.895
77.	Pariaman	9.895
Jumlah		644.610

Sumber : Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (BPS Sumatera Barat, 2013:6).

Lampiran 3. Penetapan Pagu Beras untuk Keluarga Miskin Per-Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013.

No	Kecamatan	Jumlah RTS (KK)	Jumlah Pagu (Kg)
1.	Koto IX Tarusan	2.426	545.850
2.	IV Nagari Bayang Utara	778	175.050
3.	Bayang	1.854	417.150
4.	IV Jurai	1.694	381.150
5.	Batang Kapas	1.690	380.250
6.	Sutera	2.433	547.425
7.	Lengayang	3.089	695.025
8.	Ranah Pesisir	2.089	470.025
9.	Linggo Sari Baganti	2.930	659.250
10.	Pancung Soal	1.068	240.300
11.	Air Pura	1.079	242.775
12.	Basa Ampek Balai Tapan	684	153.900
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	971	218.475
14.	Lunang	1.160	261.000
15.	Silaut	353	79.425
Jumlah		24.298	5.467.050

Sumber : Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, 2013.

Lampiran 4. Daerah/Kabupaten yang Menunggak Pembayaran Hasil Penjualan Raskin Pada Tahun 2013 di Sumatera Barat.

No	Daerah/Kabupaten	Besar Tunggakan (Juta)
1.	Pesisir Selatan	241,29
2.	Padang Pariaman	111,39
3.	Mentawai	24,86

Sumber: Ranah Berita, 2014.

Lampiran 5. Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013.

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
1.	Koto IX Tarusan	10.432
2.	IV Nagari Bayang Utara	1.525
3.	Bayang	7.853
4.	IV Jurai	9.630
5.	Batang Kapas	6.732
6.	Sutera	10.317
7.	Lengayang	11.264
8.	Ranah Pesisir	6.538
9.	Linggo Sari Baganti	9.391
10.	Pancung Soal	5.247
11.	Basa Ampek Balai Tapan	2.857
12.	Ranah Ampek Hulu Tapan	2.963
13.	Lunang	4.248
14.	Silaut	2.804
Total		94.986

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2014:34).

Lampiran 6. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Program Raskin di Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Kecamatan	Rumah Tangga (KK)	Jumlah RTS (KK)	Persentase (%)
1.	Koto IX Tarusan	10.432	2.426	23
2.	IV Nagari Bayang Utara	1.525	778	51
3.	Bayang	7.853	1.854	23
4.	IV Jurai	9.630	1.694	17
5.	Batang Kapas	6.732	1.690	25
6.	Sutera	10.317	2.433	23
7.	Lengayang	11.264	3.089	27
8.	Ranah Pesisir	6.538	2.089	32
9.	Linggo Sari Baganti	9.391	2.930	31
10.	Pancung Soal	5.247	1.068	20
11.	Air Pura	2.857	1.079	37
12.	Basa Ampek Balai Tapan	2.963	684	23
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	4.248	971	23
14.	Lunang	2.804	1.160	41
15.	Silaut	10.432	353	3
Total		94.986	24.298	-

Sumber : Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, 2013.

Lampiran 7. Penetapan Pagu Beras bagi Keluarga Miskin di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2013.

No	Titik Distribusi/Nagari	Jumlah RTS (KK)	Pagu Raskin (Kg)
1.	Puluik-puluik	74	16.650
2.	Puluik-puluik Selatan	133	29.925
3.	Koto Ranah	92	20.700
4.	Muaro Aie	46	10.350
5.	Pancung Taba	208	46.800
6.	Limau Gadang Pc. Taba	225	50.625
Jumlah		778	175.050

Sumber : Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, 2013.

Lampiran 8. Daftar Populasi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin di Nagari Ngalau Gadang tahun 2013.

No	Kepala RT	No	Kepala RT	No	Kepala RT	No	Kepala RT	No	Kepala RT	No	Kepala RT
1	Zainab	21	Yasmir	41	Syamsir	61	Budi Harjo	81	Edi	101	Ariadi
2	Abdul Kadir	22	Zulbadri	42	Zainudin	62	Ardison	82	Basrial Upik	102	Karnadi
3	Sarijal	23	Faisal	43	Erwin	63	Nurbati	83	Samsinar	103	Noferi
4	Sudirman T	24	Candra	44	Alimar	64	Maidir	84	Darmawi	104	Basrial Ida
5	Erman Mis	25	Safrianto	45	Murilm	65	Mardi Nurzen	85	Yarnis	105	Sawar
6	Rahma Danir	26	Agusman	46	Samuil	66	Bahara	86	Hasan Basri	106	Sudirman
7	Adrizal	27	Syamsudin	47	Suhendra	67	Kamardi	87	Sahminan	107	Abuazir
8	Sahar	28	Yusrial	48	Alius	68	Katar	88	Budasir	108	Butan
9	Kaidar	29	Nasrul	49	Zulfami	69	Raflis	89	Marlis P.R	109	Kamardi
10	Jasril	30	Ali Umar	50	Trisno	70	Yurman	90	Marjohan	110	Ilis
11	Zulkifli	31	Ema Yusni	51	Jusiam	71	Mudaris	91	Zen Akmal	111	Jamalis
12	Hanipan	32	Darmianti	52	Busnar	72	Nurnis	92	Kamirin	112	Yusna
13	Samidar	33	Ramudin	53	Aliani	73	Afrizal	93	Aliamat T	113	Sapuri
14	Darani	34	Asna	54	Maakir	74	Ramudin	94	Busrial	114	Samsawir
15	Maridin	35	Yarna	55	Suhai Nasri	75	Musid	95	Ardius	115	Nasrial
16	Junaidi	36	Maamar	56	Indra Soni	76	Nasrial	96	Tansurman	116	Rasidin
17	Masrial	37	Abai Nudin	57	Makyunir	77	Noveri	97	Mansur	117	Admaryon
18	Sahrul	38	Asril	58	Amiral	78	Salman	98	Syafrial	118	Darizal
19	Joni Iskandar	39	Erpen	59	Sudirman M	79	Romi	99	Aliamar	119	Ermen
20	Raminis	40	Kamardi	60	Muklis	80	Syafrizal	100	Kamarina	120	Muslim

Sumber: Kantor Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, 2013.

Lampiran 8 (Lanjutan).

No	Kepala RT	No	Kepala RT	No	Kepala RT	No	Kepala RT	No	Kepala RT
121	Azwar	142	Ismed	163	Yusra	184	Zainal	205	Ishak
122	Ardismal	143	Alimiras	164	Syahrudin	185	Alimardi	206	Busrial
123	Tasan	144	Nofrial	165	Agusman	186	Hamdani	207	Syahbunan
124	Syahrial	145	Johar	166	Apdil	187	Makyunir	208	Markis
125	Dafril	146	Mawardi	167	Darmalis	188	Sofian	209	Nurma
126	Nursima	147	Jamaludin	168	Amuis	189	Satrio Eka Putra	210	Amirudin
127	Tansurman	148	Mansur	169	Pono Kalek	190	Azwar	211	Onhendri
128	Yuliar	149	Yusran	170	Nasrial	191	Efoardi	212	Taslin
129	Multasman	150	Masrial	171	Amirusdi	192	Mursal	213	Rita Susanti
130	Yusmaniar	151	Maidir	172	Amigus	193	Joni Efendi	214	Sabirin
131	Jamaludin	152	Rasidin	173	Ilyas	194	Azwar	215	Almasri
132	M Tahar	153	Malur	174	Sahari	195	Budi Wardisman	216	Ilyas mandaro
133	Agus MLY	154	Ramli	175	Syafril	196	Jisman	217	Linar
134	Jarijis	155	Suardi	176	Harjono	197	Nurlin	218	Mansur
135	Maidir	156	Kasmir	177	Buamar	198	Maas	219	Alikamar
136	Nuriah	157	Alinun	178	Baidar	199	Aliasman	220	Fatmawati
137	Jasril	158	Jonherman	179	Taslim	200	Syamsir	221	Yurnalis
138	Esa Putra	159	Basrial	180	Tasin	201	Erman	222	Idris Nofrizal
139	Niar	160	Nazar M	181	Rahmat GD	202	Syafril TN	223	Yarna
140	Jasman	161	Rusfahmi	182	Makjawab	203	Sawajir	224	Asnimar
141	Eli Rohana	162	Bainun	183	Susniati	204	Zaiful Azhar	225	Alimardi

Lampiran 9. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang Menjadi Responden Penelitian di Nagari Limau Gadang.

Limau-limau			Ngalau Gadang		
No	Nama	No. Urut	No	Nama	No. Urut
1.	DARANI	14	1.	ISMED	142
2.	KAMARDI	40	2.	YURNALIS	221
3.	KARNADI	102	3.	MANSUR M. BATUAH	218
4.	ERMEN	119	4.	MURSAL	192
5.	MARDI NURZEN	65	5.	BUAMAR	177
6.	SAHAR	8	6.	JONI EFENDI	193
7.	CANDRA	24	7.	ALIASMAN	199
8.	AMIRAL	58	8.	ONHENDRI	211
9.	ERMAN . MIS	5	9.	MURSIMA	126
10.	BUDASIR	88	10.	AMUROSDI	171
11.	INDRA JONI	56	11.	ZAIQUL AZHAR	204
12.	NOPERI EPA	77	12.	FATMAWATI	220
13.	AGUSMAN	26	13.	IDRIS NOFRIZAL	222
14.	MUDARIS	71	14.	MAIDIR (ROSMI)	151
15.	YASMIR	21	15.	SYAMSIR	200
16.	YURMAN	70	16.	YUSMANUAR	130
17.	FALSAL	23	17.	LINAR	217
18.	ARLUS	48	18.	MAIDIR (ARNIS)	135
19.	ROMI	79	19.	BUDI WARDISMAN	195
20.	SAPURI	113	20.	EFOARDI	191
21.	MARJOTAH	90	21.	RAMU	154
22.	ABDUL KADIR	2	22.	DAFRIL	125
23.	JUNAIDI	116	23.	TASLIN	212
24.	MUSID	75	24.	AUMARDI . T	225
25.	MARIDIN	15	25.	AUMARDI . B	185
26.	SAMSAWIR	114	26.	ALYAS MANDARO	216
27.	ALANI	53	27.	MAKYUMIR	187
28.	SARISAL	3	28.	DARMAUS	167
29.	SUDIRMAN . M	59	29.	JISMAN	196
30.	KAMARINA	100	30.	SATRIO EKA PUTRA	189
31.	SYAFRIAL	98	31.	MAWARDI	146
32.	RAFLIS	69			
33.	ARIADI	101			
34.	ARDISON	62			
35.	SYAHMINAN	87			
36.	BASRIAL UPIK	82			
37.	SYAHRUL	18			
38.	NOPERI . ETI	103			

Mengetahui,
Wali Nagari Limau Gadang


Lampiran 10. Data Tingkat Keberhasilan Program Raskin Bagi Setiap Rumah Tangga Responden di Nagari Limau Gadang Pc. Taba tahun 2013.

No	Nama Responden	Skor untuk Tepat Sasaran							Skor	TS	TJ	TH	TW	TK	TA	(%)	Tingkat Keberhasilan
		C3	C4	C5	C6	C7	C10	C11									
		i	ii	iii	iv	v	vi	vii									
1	Responden 1	0	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	1	16,67	Kurang Berhasil
2	Responden 2	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
3	Responden 3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16,67	Kurang Berhasil
4	Responden 4	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
5	Responden 5	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
6	Responden 6	0	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	1	16,67	Kurang Berhasil
7	Responden 7	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
8	Responden 8	1	0	1	1	1	1	1	6	1	0	0	1	0	1	50,00	Cukup Berhasil
9	Responden 9	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	16,67	Kurang Berhasil
10	Responden 10	1	0	1	1	1	0	0	4	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
11	Responden 11	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
12	Responden 12	1	0	1	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	16,67	Kurang Berhasil
13	Responden 13	1	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	16,67	Kurang Berhasil
14	Responden 14	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
15	Responden 15	1	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
16	Responden 16	1	0	1	0	1	0	1	4	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
17	Responden 17	1	1	1	1	1	0	0	5	1	0	0	1	0	1	50,00	Cukup Berhasil

Lampiran 10 (Lanjutan).

18	Responden 18	1	0	1	0	1	1	0	4	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
19	Responden 19	0	1	1	1	1	0	1	5	1	0	0	0	0	1	33,33	Kurang Berhasil
20	Responden 20	1	0	1	1	1	0	1	5	1	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
21	Responden 21	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
22	Responden 22	0	0	1	1	1	1	0	4	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
23	Responden 23	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
24	Responden 24	0	0	1	1	1	0	1	4	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
25	Responden 25	0	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	1	1	33,33	Kurang Berhasil
26	Responden 26	0	0	1	1	1	0	1	4	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
27	Responden 27	0	0	1	1	1	0	1	4	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
28	Responden 28	0	0	1	1	1	1	1	5	1	0	0	1	1	1	66,66	Berhasil
29	Responden 29	1	0	1	0	1	1	1	5	1	0	0	1	1	1	66,66	Berhasil
30	Responden 30	0	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
31	Responden 31	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
32	Responden 32	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
33	Responden 33	1	0	1	0	0	1	1	4	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
34	Responden 34	1	0	1	0	1	1	1	5	1	1	0	1	1	1	83,33	Sangat Berhasil
35	Responden 35	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
36	Responden 36	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
37	Responden 37	0	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
38	Responden 38	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil

Lampiran 10 (Lanjutan).

39	Responden 39	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
40	Responden 40	1	1	1	1	0	0	0	4	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
41	Responden 41	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	66,66	Berhasil
42	Responden 42	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	1	33,33	Kurang Berhasil
43	Responden 43	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
44	Responden 44	0	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
45	Responden 45	0	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
46	Responden 46	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
47	Responden 47	1	0	1	1	1	0	1	5	1	0	0	0	0	1	33,33	Kurang Berhasil
48	Responden 48	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	33,33	Kurang Berhasil
49	Responden 49	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1	50,00	Cukup Berhasil
50	Responden 50	1	0	1	1	1	0	1	5	1	0	0	0	1	1	50,00	Cukup Berhasil
51	Responden 51	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	33,33	Kurang Berhasil
52	Responden 52	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	33,33	Kurang Berhasil
53	Responden 53	0	0	1	1	0	0	1	3	0	1	0	1	0	1	50,00	Cukup Berhasil
54	Responden 54	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	33,33	Kurang Berhasil
55	Responden 55	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	50,00	Cukup Berhasil
56	Responden 56	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
57	Responden 57	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	1	16,67	Kurang Berhasil
58	Responden 58	0	0	1	0	1	1	1	4	0	1	0	1	0	1	50,00	Cukup Berhasil
59	Responden 59	1	0	1	1	0	0	1	4	0	1	0	1	0	1	50,00	Cukup Berhasil

Lampiran 10 (Lanjutan).

60	Responden 60	1	0	1	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	1	33,33	Kurang Berhasil
61	Responden 61	0	1	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	33,33	Kurang Berhasil
62	Responden 62	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	50,00	Cukup Berhasil
63	Responden 63	1	0	1	1	0	0	1	4	0	1	0	1	0	1	50,00	Cukup Berhasil
64	Responden 64	1	0	1	1	1	0	1	5	1	0	0	0	0	1	33,33	Kurang Berhasil
65	Responden 65	1	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	1	50,00	Cukup Berhasil
66	Responden 66	1	0	1	1	1	0	1	5	1	1	0	0	0	1	50,00	Cukup Berhasil
67	Responden 67	1	1	1	1	1	1	0	6	1	1	0	0	0	1	50,00	Cukup Berhasil
68	Responden 68	1	0	1	1	1	0	1	5	1	0	0	1	1	1	66,66	Berhasil
69	Responden 69	1	0	1	1	0	0	1	4	0	0	0	1	1	1	50,00	Cukup Berhasil
	Rata-rata	34	9	69	33	33	14	36	-	14	14	0	48	31	69	42,51	Cukup Berhasil

Sumber: Analisis Data Primer.

Lampiran 11. Data Tingkat Manfaat Program Raskin Bagi Setiap Rumah Tangga Responden di Nagari Limau Gadang Pc. Taba tahun 2013.

No	Nama Responden	Jumlah Raskin (Kg)	Harga Raskin (Rp/kg)	Harga Beras di Pasar (Rp/kg)	Jumlah Anggota Keluarga (Orang)	Rata-rata Konsumsi Beras (Kg/kapita/bulan)	Jumlah Konsumsi Beras Rumah Tangga (Kg/RT/bulan)	Pengeluaran /kapita/ bulan (Rp)	Pengurangan Beban Pengeluaran/ kapita/bulan (Rp)	(%)	Tingkat Manfaat Program
1	Responden 1	8,7	2.250	8.125	4	10	40	81.250	12.778	15,73	Kurang Bermanfaat
2	Responden 2	10,7	2.250	6.875	5	8	40	55.000	9.897	18,00	Kurang Bermanfaat
3	Responden 3	8	2.250	8.125	6	9,3	56	75.833	7.833	10,33	Kurang Bermanfaat
4	Responden 4	10,7	2.250	6.250	6	14,9	90	93.333	7.133	7,64	Kurang Bermanfaat
5	Responden 5	11,3	2.250	8.125	4	8	32	65.000	16.597	25,53	Kurang Bermanfaat
6	Responden 6	7,3	2.250	6.250	3	8	24	50.000	9.733	19,47	Kurang Bermanfaat
7	Responden 7	10	2.250	6.875	5	8	40	55.000	9.250	16,82	Kurang Bermanfaat
8	Responden 8	10,7	2.250	6.250	6	8,5	51	53.333	7.133	13,38	Kurang Bermanfaat
9	Responden 9	8,7	2.250	6.250	4	10	40	62.500	8.700	13,92	Kurang Bermanfaat
10	Responden 10	10	2.250	8.125	2	8	16	65.000	29.375	45,19	Cukup Bermanfaat
11	Responden 11	10,7	2.250	6.875	4	9,2	37	63.250	12.372	19,56	Kurang Bermanfaat
12	Responden 12	9,3	2.250	8.125	3	9,6	28,8	78.000	18.212	23,35	Kurang Bermanfaat
13	Responden 13	8	2.250	7.500	3	9,6	28,8	72.000	14.000	19,44	Kurang Bermanfaat
14	Responden 14	10	2.250	6.875	4	10	40	68.750	11.563	16,82	Kurang Bermanfaat
15	Responden 15	10,7	2.250	7.500	3	9,6	28,8	72.000	18.725	26,01	Kurang Bermanfaat
16	Responden 16	12,7	2.250	6.875	5	9,6	48	66.000	11.747	17,80	Kurang Bermanfaat

Lampiran 11 (Lanjutan).

17	Responden 17	10	2.250	8.125	4	6	24	48.750	14.688	30,13	Kurang Bermanfaat
18	Responden 18	10	2.250	6.875	5	8	40	55.000	9.250	16,82	Kurang Bermanfaat
19	Responden 19	8	2.250	7.500	3	8	24	60.000	14.000	23,33	Kurang Bermanfaat
20	Responden 20	10	2.250	8.125	2	8	16	65.000	29.375	45,19	Cukup Bermanfaat
21	Responden 21	10	2.250	8.125	2	9,6	19,2	78.000	29.375	37,66	Kurang Bermanfaat
22	Responden 22	10,6	2.250	8.125	3	6,4	19,2	52.000	20.758	39,92	Kurang Bermanfaat
23	Responden 23	10	2.250	7.500	4	8	32	60.000	13.125	21,88	Kurang Bermanfaat
24	Responden 24	10	2.250	8.125	2	8	16	65.000	29.375	45,19	Cukup Bermanfaat
25	Responden 25	6,7	2.250	7.500	2	8	16	60.000	17.588	29,31	Kurang Bermanfaat
26	Responden 26	12,7	2.250	7.500	4	8,8	35,2	66.000	16.669	25,26	Kurang Bermanfaat
27	Responden 27	10,7	2.250	7.500	2	8	16	60.000	28.088	46,81	Cukup Bermanfaat
28	Responden 28	10	2.250	7.500	3	6,4	19,2	48.000	17.500	36,46	Kurang Bermanfaat
29	Responden 29	12	2.250	6.250	6	7,2	43,2	45.000	8.000	17,78	Kurang Bermanfaat
30	Responden 30	10	2.250	6.875	3	8	24	55.000	15.417	28,03	Kurang Bermanfaat
31	Responden 31	10	2.250	7.500	6	9,3	56	420.000	52.500	12,50	Kurang Bermanfaat
32	Responden 32	10	2.250	7.500	5	8	40	300.000	52.500	17,50	Kurang Bermanfaat
33	Responden 33	10,7	2.250	7.500	6	9,33	56	420.000	56.175	13,38	Kurang Bermanfaat
34	Responden 34	15	2.250	6.250	6	9,33	56	350.000	60.000	17,14	Kurang Bermanfaat
35	Responden 35	10	2.250	8.125	4	10	40	325.000	58.750	18,08	Kurang Bermanfaat
36	Responden 36	10	2.250	8.125	3	8	24	195.000	58.750	30,13	Kurang Bermanfaat

Lampiran 11 (Lanjutan).

37	Responden 37	12	2.250	6.250	6	8	48	50.000	8000	16,00	Kurang Bermanfaat
38	Responden 38	11,33	2.250	7.500	6	9,07	54,4	68.000	9914	14,58	Kurang Bermanfaat
39	Responden 39	9,37	2.500	8.125	4	9,6	38,4	78.000	13177	16,89	Kurang Bermanfaat
40	Responden 40	12	2.500	6.875	7	10,29	72	70.714	7500	10,61	Kurang Bermanfaat
41	Responden 41	15	2.500	8.125	7	10,29	72	83.571	12054	14,42	Kurang Bermanfaat
42	Responden 42	15	2.500	8.125	5	11,52	57,6	93.600	16875	18,03	Kurang Bermanfaat
43	Responden 43	11,2	2.500	7.500	5	10,24	51,2	76.800	11200	14,58	Kurang Bermanfaat
44	Responden 44	10	2.500	7.500	3	8	24	60.000	16667	27,78	Kurang Bermanfaat
45	Responden 45	10	2.500	7.500	4	10	40	75.000	12500	16,67	Kurang Bermanfaat
46	Responden 46	10	2.500	7.500	5	9,6	48	72.000	10000	13,89	Kurang Bermanfaat
47	Responden 47	5,28	2.500	6.250	6	5,33	32	33.333	3300	9,90	Kurang Bermanfaat
48	Responden 48	13,28	2.300	7.500	7	10,29	72	77.143	9865	12,79	Kurang Bermanfaat
49	Responden 49	15	2.500	6.875	5	8,96	44,8	61.600	13125	21,31	Kurang Bermanfaat
50	Responden 50	10,56	2.500	7.500	3	8	24	60.000	17600	29,33	Kurang Bermanfaat
51	Responden 51	8	2.500	8.125	4	4,8	19,2	156.000	45000	28,85	Kurang Bermanfaat
52	Responden 52	5,32	2.500	6.875	6	13,33	80	550.000	23275	4,23	Kurang Bermanfaat
53	Responden 53	18	2.500	7.500	5	9,6	48	360.000	90000	25	Kurang Bermanfaat
54	Responden 54	14	2.500	8.125	4	10	40	325.000	78750	24,23	Kurang Bermanfaat
55	Responden 55	20	2.500	7.500	4	8	32	240.000	100000	41,67	Cukup Bermanfaat
56	Responden 56	10	2.500	7.500	6	9,33	56	420.000	50000	11,90	Kurang Bermanfaat
57	Responden 57	14,4	2.375	7.500	4	8	32	240.000	73800	30,75	Kurang Bermanfaat

Lampiran 11 (Lanjutan).

58	Responden 58	19,2	2.500	6.875	5	9,6	48	66.000	16.800	25,45	Kurang Bermanfaat
59	Responden 59	20,4	2.500	7.500	7	10,29	72	77.143	14.571	18,89	Kurang Bermanfaat
60	Responden 60	8	2.500	6.875	6	10,13	60,8	69.667	5.833	8,37	Kurang Bermanfaat
61	Responden 61	15	2.625	8.125	5	11,2	56	91.000	16.500	18,13	Kurang Bermanfaat
62	Responden 62	20,4	2.500	8.125	8	8	64	65.000	14.344	22,07	Kurang Bermanfaat
63	Responden 63	15	2.500	7.500	5	9,6	48	72.000	15.000	20,83	Kurang Bermanfaat
64	Responden 64	10,72	2.500	6.250	5	8	40	50.000	8.040	16,08	Kurang Bermanfaat
65	Responden 65	20,4	2.600	6.875	7	9,14	64	62.857	12.459	19,82	Kurang Bermanfaat
66	Responden 66	17,28	2.300	7.500	4	6	24	45.000	22.464	49,92	Cukup Bermanfaat
67	Responden 67	15	2.300	7.500	5	9,6	48	72.000	15.600	21,67	Kurang Bermanfaat
68	Responden 68	10	2.500	6.875	4	7,2	28,8	49.500	10.938	22,10	Kurang Bermanfaat
69	Responden 69	10	2.500	6.875	8	9	72	61.875	5.469	8,84	Kurang Bermanfaat
	Rata-rata	11,56	2.355	7.373	5	8,8	42	65.425	13.993	21,39	Kurang Bermanfaat

Sumber: Analisis Data Primer.

